



**PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN KETUA UMUM BADAN
PERWAKILAN DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI
ANGGOTANYA DALAM PEMBANGUNAN DESA**

(Studi tentang proses pengambilan keputusan dalam rangka Perencanaan program pembangunan di Desa Balung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)

S K R I P S I

Dijadikan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Nur Rahmad Cahyadi

NIM ; 96-1198

Pembimbing

Dra. Nasikah Hadi

Dra. Anastasia Murdyastuti, Msi

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl, 18 MAR 2003
No. Induk :

S
Klass
352
CAH
P

2.1

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan diterima
Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2002

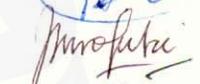
Jam : 10.00 WIB

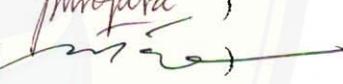
Panitia Penguji

1. Ketua : Drs .S. Soerantomo
2. Pembimbing I : Dra. Nasikah Hadi
3. Pembimbing II : Dra. Anastasia Murdyastuti. Msi
4. Anggota : Drs. Anwar. Msi

()

()

()

()

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dekan



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

MOTTO

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk yang benar (Al Quran) dengan agama yang haq, untuk dimenangkan atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. (QS. At taubah: 33)



PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya dengan rasa hormat kepada
Yang tersayang dan tercinta
Almarhum Ibundaku tercinta yang telah memberikan doa, semangat,
perhatian dan kasih sayangnya yang tak pernah putus sepanjang hayatku.
Almarhum ayahku tercinta yang pengorbanannya selama masa hidup tak akan
pernah lepas dari hidupku.
Semoga Allah SWT mempertemukan kelak kita di Jannatus Naim*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Begitu banyak rintangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan karya tulis ini. Namun berkat kesungguhan hati dan atas ijin-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini didasari kondisi kepemimpinan ketua umum BPD yang ada didesa Bulang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja atau partisipasi dari anggotanya. Dalam hal ini Ketua umum BPD dituntut untuk meningkatkan perilakunya dalam usaha peningkatan kinerja anggotanya. Meskipun upaya maksimal telah penulis curahkan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk lebih sempurnanya skripsi ini maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, bimbingan dan doa. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
4. Bapak Drs. H. Budiyo. Msi selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
5. Ibu Dra. Nasikah Hadi selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Anastasia Murdyastuti. Msi selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dengan tak mengenal lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Selfi Budi Helpiastuti. Msi selaku Dosen Wali yang banyak memberikan nasehat-nasehat berharga selama ini.
8. Bapak Muh. Ilyas SH selaku Kepala Desa Bulang Kecamatan Gending Kab. Probolinggo yang telah berkenan memberikan ijin atas penelitian ini.
9. Seluruh pengurus atau anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bulang yang telah sudi menerima dengan keramahannya dan banyak membantu selama penelitian berlangsung.
10. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
11. Rekan-rekan AN '96, persahabatan kita tidak akan pernah kulupakan selama hidupku.
12. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga amal budi yang telah diberikan diterima dan dibalas oleh Allah SWT. dan semoga stripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jember, Juni 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
1.4 Kerangka Teori.....	20
1.5 Konsepsi Dasar.....	28
1.5.1 Konsep Perilaku Pemimpin.....	28
1.5.2 Konsep Partisipasi Anggota BPD.....	31
1.6 Hipotesis.....	32
1.7 Definisi Operasional.....	33
1.7.1 Operasionalisasi Variabel Perilaku Ketua Umum BPD (X).....	34
1.7.2 Operasionalisasi Variabel Partisipasi Anggota BPD Dalam Pembangunan Desa (Y).....	35
1.8 Metode Penelitian.....	36

Tabel 9. Pengeluaran rutin pembangunan Periode 2001-2002 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo

No	Pos pengeluaran rutin	Jumlah
1	Penghasilan rutin kepala desa	24.175.000
2	Sekretaris desa	12.580.000
3	Kepala seksi (3 orang)	21.030.000
4	Kepala dusun (5 orang)	19.047.500
5	Kepala urusan (3 orang)	7.867.000
6	Pos belanja BPD	1.000.000
7	Uang sidang BPD	2.680.000
8	Alat tulis BPD	250.000
9	Alat tulis Kantor LKD	250.000
10	Alat tulis desa	525.000
11	Peralatan kantor	1.300.000
12	Administrasi dana pembangunan desa kelurahan (DPDK)	240.400
13	Pengecatan kantor	250.000
14	Pemeliharaan kantor desa	2.000.000
15	Perjalanan dinas perangkat desa	200.000
16	Perjalanan dinas BPD	200.000
17	Rapat-rapat/kegiatan desa	1.200.000
18	Biaya operasional DPDK	275.000
19	Penentuan proyek	100.000

Sumber: Data sekunder Desa Bulang Tahun 2001

BAB II. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Pengantar	44
2.2 Letak Geografis	44
2.3 Jumlah Penduduk	45
2.3.1 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	46
2.3.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Kelompok Tenaga Kerja	46
2.3.3 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	
2.4 Sarana dan Prasarana Dibidang Pembangunan	46
2.4.1 Bidang Agama	47
2.4.2 Bidang Pendidikan.....	47
2.4.3 Sarana Perhubungan	47
2.4.4 Sarana Komunikasi.....	47
2.4.5 Sarana Transportasi	47
2.4.6 Sarana Pengairan	47
2.4.7 Sarana Pemerintahan Desa	48
2.4.8 Sarana Perekonomian	48
2.4.9 Sarana Olahraga.....	48
2.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	48
2.6 Badan Perwakilan Desa (BPD)	54

BAB III PENYAJIAN DATA VARIABEL PENELITIAN

3.1 Pengantar	62
3.2 Penyajian Data Variabel Pengaruh (X)	62
3.2.1 Perilaku Mengarahkan/Tugas (X1)	62
3.2.2 Perilaku Mendukung/Hubungan (X2)	63
3.3 Penyajian Data Variabel (Y).....	65

BAB IV ANALISIS DAN INTREPRETASI DATA

4.1 Pengantar	68
4.2 Penerapan dalam menggunakan test fisher	
4.2.1 Memasukkan Frekwensi observasi kedalam tabel 2x2	68
4.2.2 Menentukan jumlah marginal	70
4.2.3 Menghitung test signifikansi fisher	70
4.3.4 Menentukan Signifikansi observasi dengan acuan tabel I	71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

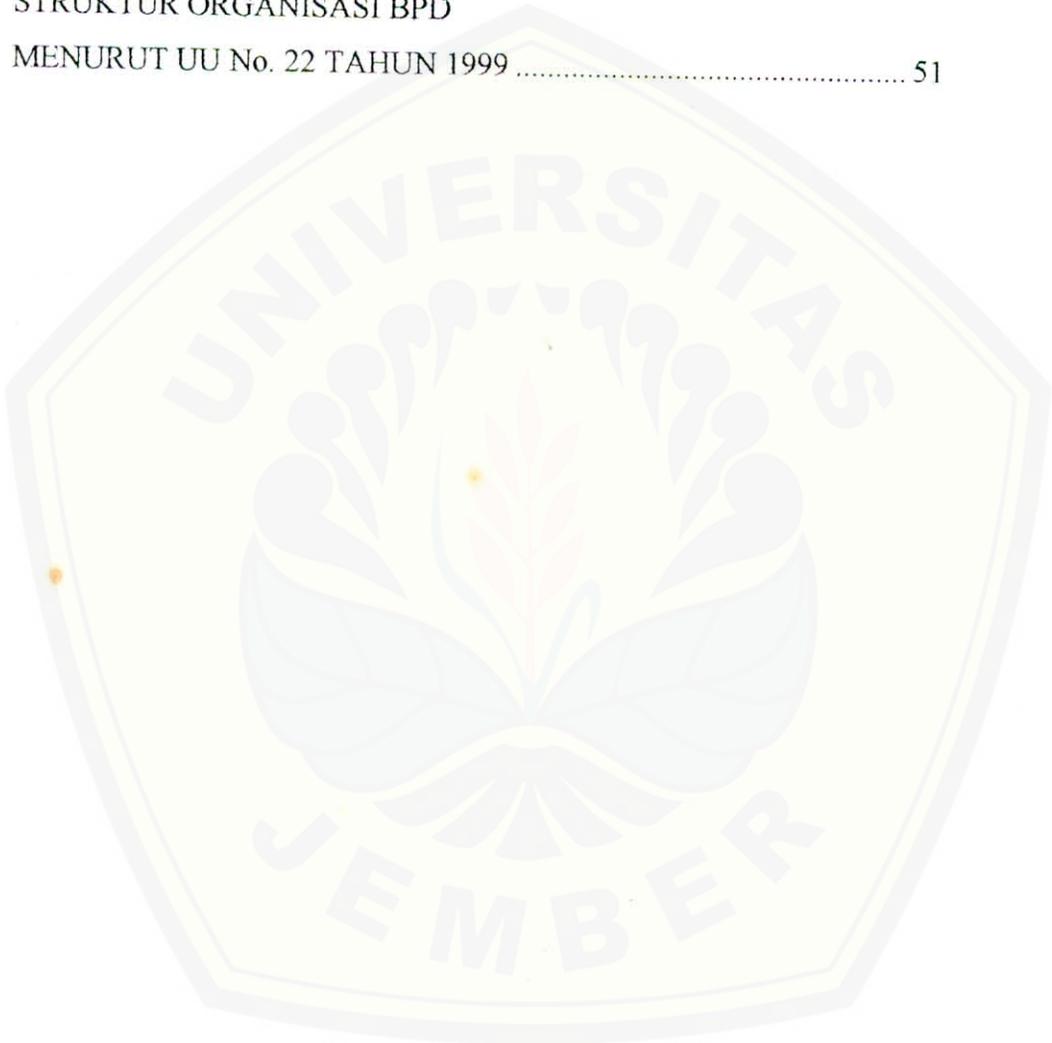
Tabel	Halaman
1. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Yang Dicapai Oleh BPD dalam Pembangunan Desa Bulang.....	14
2. Produk-produk Peraturan Desa Yang Dihasilkan Oleh BPD dan Pemerintah Desa Bulang.....	17
3. Bentuk Pengawasan BPD terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bulang.....	44
4. Daftar Kehadiran Rapat Ketua Umum BPD.....	45
5. Pembagian Luas Wilayah Desa Bulang.....	46
6. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan.....	46
7. Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Kelompok tenaga Kerja.....	59
8. Komposisi Penduduk menurut Mata Pencanharian.....	59
9. Susunan Pengurus BPD Periode 2000-200 DesaBulang.....	60
10. Nama-nama Perangkat Pemerintah Desa Bulang.....	60
11. Nama-nama Tokoh Masyarakat.....	61
12. Nama-nama Tokoh Agama.....	61
13. Jenis-jenis Pos Penerimaan Biaya Pembangunan Periode 2000-2001 Desa Bulang.....	64
14. Jenis-Jenis Pengeluaran rutin Pembangunan Periode 2000-2002 Desa Bulang.....	64
15. Data Total Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengaruh Indikator Perilaku Mengarahkan /Tugas (X1).....	65
16. Data Total Skor Jawaban Respdnen Terhadap Variabel Pengaruh Indikator Perilaku Mendukung/Hubungan (X2).....	66

17 Data Total skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengaruh.....	66
18 Data Total Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Tepengaruh (Y).....	66
19 Frekuensi Partisipasi Anggota BPD.....	68
20 Data Kriteria Jawaban Responden Terhadap Variabel (X) (Y)	68
21 Tabel Persiapan Untuk mengetahui Perilaku Ketua Umum BPD	72
22 Prosentase Jawaban Responden Dari Variabel Perilaku Ketua Umum BPD.....	73
23 Prosentase Jawaban Responden Dari Variabel Partisipasi Anggota BPD.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1999	46
2. STRUKTUR ORGANISASI BPD MENURUT UU No. 22 TAHUN 1999	51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Quesioner.....	73
2. Tingkat Signifikansi Tabel L.....	74
3. Surat Ijin Penelitian Dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.....	75
4. Surat Ijin Penelitian Dari Kantor Dinas Kesatuan Bangsa Probolinggo.....	76
5. Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian Dari Kantor Desa Bulang	77
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 Tentang Badan Perwakilan Desa.....	78
7. Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa.....	79
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.....	80



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Proses pembangunan negara-negara berkembang yang terjadi pada masyarakat termasuk masyarakat desa tidak terlepas dari peran serta pemerintah. Dengan demikian jelas yang merencanakan dan merekayasa pembangunan adalah pemerintah. Peran serta ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal dari negara-negara maju.

Indonesia adalah negara sedang berkembang yang melaksanakan pembangunan disegala sektor kehidupan. Meskipun pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor tersebut mengalami hambatan krisis ekonomi yang menerjang pada pertengahan 1997, namun pemerintah tetap berusaha dengan segenap kemampuan melaksanakan pembangunan. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, ternyata sektor yang paling survive adalah pertanian. Sektor pertanian diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian nasional.

Dengan melihat kenyataan diatas hendaknya kebijaksanaan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan pedesaan sebagai upaya memperkuat perekonomian nasional. Dimana kurang lebih 80% penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Pembangunan pedesaan akan sangat berguna dalam upaya mewujudkan pertahanan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Raharjo (1999:192) menyatakan bahwa, "Pembangunan adalah merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan". Pembangunan nasional Indonesia secara berencana telah direncanakan semenjak tahun 1960-an, khususnya lewat dewan perancang nasional (DEPPERNAS) yang memprioritaskan pembangunan dibidang ekonomi. Dengan demikian pembangunan nasional telah dilaksanakan semenjak orde lama, orde baru hingga sekarang.

Sedangkan menurut Tjokroaminoto (1995:2), "Pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh bangsa". Sedangkan Siagian (1998:2)

menambahkan pula tentang definisi pembangunan sebagai berikut, "Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang kontinyu dalam suatu keadaan tertentu pada suatu keadaan yang lebih baik". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan itu merupakan suatu usaha menciptakan suatu perubahan atau pertumbuhan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bryant dan Coralie sebagai berikut:

Pembangunan adalah peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan yang memiliki beberapa implikasi tertentu: pertama, menyiratkan pemberian perhatian pada kapasitas, kedua yaitu keadilan, dan ketiga, pertumbuhan kuasa dan wewenang.

Sedangkan UI Haq menyatakan sebagai berikut:

Pembangunan memiliki pengertian yang terdiri dua sisi yang pertama; pembentukan kemampuan atau kapabilitas manusia yang tercermin dari; kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat; kedua; penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan atau untuk aktivitas dalam sosial budaya dan politik.

Jadi jelas pengertian diatas dipahami bahwa pembangunan merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan berbagai aspek untuk mempengaruhi masa depan yang akan dicapai.

Seperti yang tertuang dalam GBHN (1999:39) bahwa, "Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan secara lahir dan batin". Dengan demikian pembangunan itu harus merata diseluruh tanah air. Pembangunan tidak hanya diperkotaan namun juga dipedesaan yang memerlukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk lebih jelasnya pemerataan hasil pembangunan juga terdapat pada trilogi pembangunan yang meliputi:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
3. Stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis

Jadi pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia haruslah merefleksikan pembangunan yang menyeluruh dari semua aspek baik ekonomi, sosial, budaya serta adil dan merata. Marbun (1988:29) menyatakan bahwa, “Pembangunan Indonesia tidak ada artinya tanpa membangun desa yang akan dilaksanakan akan sangat berguna bagi ketahanan nasional, sebab ketahanan nasional memiliki akar desa”. Sehingga dapat dikatakan Indonesia akan makmur apabila pembangunan didesa berjalan dengan sukses.

Disamping batasan-batasan tersebut, pembangunan desa di Indonesia memiliki arti bahwa pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif dari setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antar masyarakat dan lingkungannya (berdasarkan GBHN dan repelita-repelita).

Dari pengertian diatas dapat dipahami pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah. Peran pemerintah tampak dalam kegiatan memberikan pengarahan dan bimbingan pada masyarakat baik yang sifatnya petunjuk, program pembangunan maupun badan teknis dan bantuan fisik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena masyarakat dalam pembangunan tidak hanya obyek namun juga subyek pembangunan, dimana hasil-hasil pembangunan nantinya akan kembali dan dirasakan oleh masyarakat.

Dalam pembangunan sangatlah penting partisipasi karena justru yang dibangun itu berada ditengah-tengah masyarakat. Pembangunan itu menyangkut pengertian bahwa manusia adalah subyek dan obyek pembangunan, maka masyarakat perlu diajak dalam pembangunan. Pengertian pembangunan desa menurut Rahardjo (1999:194) adalah sebagai berikut:

Pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkatan taraf kehidupan masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dan lingkungan.

Jadi dapat dikatakan pembangunan desa merupakan suatu usaha perubahan

menuju pada yang lebih baik secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh badan yaitu pemerintah desa dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang optimal.

Agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan, maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam usaha kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat tersebut dibutuhkanlah suatu cara yang mampu menjadi suatu alat bagi terciptanya keberhasilan dari kerjasama yang dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat.

Adapun pengertian management menurut Terry (1999:50) yaitu, "Management is a distinct proses consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determined and accomplish stated obyectives by the use of human being and other resources". Maksudnya management adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, organisasi, pembagian kerja dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya.

Dari uraian diatas jelas bahwa management memiliki fungsi- fungsi seperti perencanaan, organisasi, pembagian kerja dan pengawasan. Dimana fungsi tersebut diatas memiliki peranan penting dalam keberhasilan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan fungsi manajemen tersebut adalah untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui penggalian potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Sedangkan Millet mengungkapkan manajemen sebagai berikut, "Management is the proses directing and facilitating the work of people organized informal group to achieve desired end". Maksudnya manajemen merupakan proses pembagian tugas dan fasilitator dari orang- orang yang terorganisir dalam kelompok informal untuk mencapai tujuan akhir.

Dari uraian ke dua pakar diatas jelas bahwa manajemen memiliki peranan penting dalam fungsi- fungsinya dinilai dari perencanaan, organisasi, pembagian tugas dan pengawasan. Apabila fungsi- fungsi diatas dilaksanakan secara benar melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya tentu memudahkan usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu fungsi penting manajemen adalah organisasi, dimana organisasi sangat dibutuhkan

sebagai wadah atau tempat dari kerjasama yang dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya organisasi atau wadah mustahil dilaksanakan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Adapun definisi mengenai organisasi menurut Tanjung (1999:53) yaitu:

Suatu alat yang berhubungan antar satuan- satuan kerja yang memberi mereka kepada orang- orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai dasar dari seluruh badan usaha.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi merupakan:

- a. Wadah terselenggaranya administrasi
- b. Terjadinya berbagai hubungan antara individu maupun kelompok, baik organisasi itu sendiri maupun keluar
- c. Terjadinya kerjasama dan pembagian tugas
- d. Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Siagian (1989:7) yaitu:

"Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan atau sekelompok orang yang disebut bawahan".

Sedangkan menurut Ndraha (1991:42) Organisasi adalah, "kegiatan atau kerja sama kelompok atau seluruh anggota masyarakat (ditingkat desa) untuk mencapai maksud atau pemenuhan kebutuhan tertentu, kegiatan dan kerja sama teratur".

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Adanya hubungan dua orang atau lebih
2. Adanya kerjasama yang didasarkan atas wewenang dan tanggung jawab
3. Adanya kerjasama yang harmonis antara pimpinan dan bawahan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam usaha mencapai pembangunan desa secara optimal dibutuhkan suatu organisasi yang berfungsi untuk menampung aspirasi maupun sebagai tempat untuk melaksanakan pembangunan desa. Sesuai dengan Undang-Undang otonomi daerah tahun 1999 pasal 104, dibentuk suatu lembaga desa yang disebut Badan perwakilan desa (BPD), dimana BPD ini salah satunya berfungsi sebagai wadah untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara pembangunan desa (1999:43). Sedangkan pada pasal 105 dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan
2. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota
3. BPD bersama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa
4. Pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa

Jadi keanggotaan BPD disini dipilih dari masyarakat desa setempat. Untuk melaksanakan fungsi diatas diperlukan pimpinan yang mampu mengorganisasi anggotanya agar dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam program-program pembangunan di desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Likert bahwa pemimpin itu dapat berhasil jika bergaya partisipative management. Gaya ini menetapkan bahwa keberhasilan pemimpin adalah jika berorientasi pada bawahan dan mendasarkan pada komunikasi.

Selain itu semua pihak dalam organisasi – bawahan maupun pimpinan- menerapkan hubungan yang mendukung (supportiv relationship). Sistem terahir dari empat sistem yang dirancang oleh Likert (1999:76) Yaitu:

Dinamakan pemimpin dalam kategori kelompok berpartisipasi. Dalam ini manajer memiliki kepercayaan yang sempurna terhadap bawahan. Dalam setiap persoalan selalu meminta mereka ide-ide dan pendapat lainnya dari bawahan dan mempunyai niatan untuk mempergunakan pendapat bawahan secara konstruktif. Memberikan penghargaan kepada bawahan berdasarkan partisipasi dan keterlibatannya dalam setiap urusan terutama dalam penentuan tujuan bersama dan penilaian pencapaian tujuan tersebut. Pemimpin juga mau mendorong bawahan untuk bertanggung jawab membuat keputusan dan juga melaksanakan keputusan tersebut dengan tanggung jawab yang besar. Bawahan merasa secara mutlak mendapatkan kekuasaan untuk membicarakan sesuatu yang bertalian dengan tugasnya bersama atasan. Menurut Likert pemimpin dalam sistem ini memiliki

kesempatan untuk sukses. Lebih jauh dikatakan oleh Likert bahwa setiap organisasi yang termasuk dalam sistem ini sangat efektif dalam menetapkan tujuan dan mencapainya dan pada umumnya organisasi ini lebih produktif.

Dari uraian diatas jelas bahwa pemimpin yang mampu mengorganisasi bawahannya dalam usaha untuk meningkatkan partisipasinya akan memiliki kesempatan untuk berhasil dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan serta akan menghasilkan program pembangunan yang produktif. ketua umum BPD yang memiliki perilaku seperti yang diungkapkan oleh Likert bahwa dalam setiap persoalan selalu meminta dan mendengar ide-ide dari anggota, menggunakan ide mereka secara konstruktif dan mendorong mereka melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan program pembangunan desa akan memiliki efektifitas dalam menetapkan tujuan dan mencapainya. Aspek partisipasi disini memiliki peranan penting dalam usaha mencapai tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan didesa.

Studi empiris pun banyak menunjukkan kegagalan pembangunan karena kurangnya partisipasi dari wakil-wakil anggota masyarakat. Tanpa partisipasi dari anggotanya mustahil BPD menjalankan fungsi secara baik dan tentu pada akhirnya berimplikasi pada lambatnya kinerja program pembangunan desa. Partisipasi yang rendah tentu mengakibatkan ketimpangan pada keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Sebagaimana dinyatakan oleh Thoah (1995:72) bahwa tinggi rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Motivasi
- b. Komunikasi dua arah
- c. Fasilitas
- d. Perilaku pemimpin

Dari uraian diatas jelas bahwa partisipasi dapat ditingkatkan melalui motivasi, komunikasi dua arah, pemberian fasilitas dan perilaku pemimpin yang mendukung. Faktor-faktor diatas tidak berdiri sendiri namun saling berkaitan dalam mewujudkan partisipasi anggota. Diuraikan lebih lanjut bahwa persoalan

motivasi dari anggota perlu diperhatikan melalui usaha-usaha membuka komunikasi dua arah dengan anggota, komunikasi dua arah dengan anggota ini ditandai dengan pemimpin dan anggota saling menukar ide dalam pembuatan keputusan. Adapun alasan teoritis mengapa penulis memilih perilaku pemimpin sebagai kajian penelitian kami sebab aspek perilaku pemimpin ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Thoha (1995:72) bahwa, " dengan perilaku pemimpin, partisipasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk diterapkan bagi anggota". Dalam perilaku pemimpin yang berorientasi pada partisipasi, posisi kontrol pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dipegang secara berimbang.

Dari uraian diatas jelas bahwa perilaku pemimpin yang mendukung memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dari anggota sebab perilaku pemimpin disini dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan anggotanya, selalu menukar ide dan pendapat dalam pengambilan keputusan. Sehingga kreatifitas dan potensi dari anggota BPD dapat menghasilkan program pembangunan secara efektif dan efisien. Aspek perilaku merupakan faktor yang menentukan dalam upaya peningkatan kinerja dari bawahan, apabila perilaku pimpinan mendukung tentu berakibat rendahnya partisipasi anggota.

Sedangkan alasan praktisnya yaitu karena rendahnya tingkat partisipasi dari anggota BPD dan sebagaimana diungkapkan diatas bahwa rendahnya tingkat partisipasi anggota BPD dipengaruhi oleh perilaku ketua umum BPD. Harold (1989:121) mengungkapkan bahwa, " Perilaku adalah suatu seni atau semangat mencerminkan hasrat, kesungguhan dan intensitas dalam pelaksanaan rasa yakni mencerminkan pengalaman dan kemauan teknis". Dengan demikian pada prinsipnya perilaku adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh seseorang dalam mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain.

Berkaitan dengan hal ini ketua BPD harus memiliki suatu strategi yang tepat dalam mempengaruhi anggota BPD, yang dalam prakteknya tergantung dari situasi dan kondisi yang ada pada anggota masyarakat. Cribbin (1985:22) mengatakan bahwa, "Perilaku kepemimpinan adalah keseluruhan dari sikap dan tabiat seseorang yang tercermin dalam ucapan dan tindak lanjutnya sebagai

anggota masyarakat organisasi". Pernyataan diatas mengandung arti bahwa ketua BPD haruslah mencirikan suatu tindakan dan sikap dari keseluruhan aktivitas anggota organisasi. Selain itu pimpinan tidak hanya memotivasi dan memberi pengarahan namun juga secara aktif menjalankan apa yang direncanakan, menanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami anggota pada waktu melaksanakan tugas. Hal penting lain yaitu pemimpin harus ikut memecahkan masalah yang dihadapi anggota, menggerakkan anggota dalam pertemuan atau rapat dalam pembuatan keputusan yang akan diambil.

Agar suatu pembangunan dapat mencapai suatu tujuan yang ditetapkan, semua unsur dari BPD baik itu pimpinan maupun anggota harus terlibat secara bersama dan aktif dalam proses penyusunan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Pengambilan keputusan berkaitan dengan suatu upaya pencapaian yang berakibat positif dalam rangka pemecahan suatu masalah. Pengambilan keputusan menurut Yuwono (1993:30) dinyatakan,

Sebagai aktivitas yang sistematis dari seorang pemimpin yang berupa penilaian berbagai kemungkinan untuk selanjutnya ditentukan yang terbaik dalam menerjemahkan berbagai kebijaksanaan, penyelesaian persoalan dalam proses penyelenggaraan usaha kesejahteraan manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Dikatakan sistematis karena pengambilan keputusan harus merupakan kegiatan dan kronologi yaitu mulai penentuan masalah, alternatif pemecahan, sampai penentuan alternatif kegiatan. Jadi pengambilan keputusan merupakan suatu kegunaan yang terencana, teratur dan kronologis. Melalui BPD akan dapat ditampung semua aspirasi masyarakat desa khususnya bagaimana membentuk tatanan pembangunan yang sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat desa setempat. Berkaitan dengan partisipasi Cohen & Uphoff (1977:6) mengatakan sebagai berikut:

Partisipasi including peoples involvement in decision proses about would be done and how, their involment in implementing program and decision by contributing various ressourcees or cooperating in specific organisation or activities, their sharing in the benefit development in evaluatif such programs.

Pengertian diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut bahwa partisipasi meliputi keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program, mengambil manfaat dari pembangunan dan keterlibatan dalam usaha mengevaluasi setiap program. Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan Ndraha (1982:25) mengemukakan pendapat yang senada tentang partisipasi sebagai berikut:

1. Titik berat partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional, kehadiran secara fisik atau semata-mata dalam dalam suatu kelompok tanpa kehadiran tersebut bukanlah partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi bergerak, wujud kontribusi dalam pembangunan adalah bermacam-macam misalnya uang, jasa buah pikiran, ketrampilan dan sebagainya.
3. Kesiediaan untuk bertanggung jawab.

Dari uraian diatas maka partisipasi dalam pembangunan dapat diartikan bahwa wakil-wakil anggota masyarakat bersedia melibatkan diri secara aktif dalam proses pengambilan keputusan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

Partisipasi itu sendiri menurut Davis (1979:227) sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif, maksudnya adanya keyakinan, sikap dan tingkah laku positif dari anggota masyarakat tersebut terhadap pembangunan
2. Partisipasi pasif, maksudnya adanya keyakinan dan sikap masyarakat yang menerima terhadap pembangunan namun tindakannya kadang-kadang melaksanakan dan kadang-kadang tidak
3. Non partisipasi, maksudnya tidak adanya keyakinan dan sikap masyarakat yang menerima terhadap pembangunan dan tindakannya tidak acuh terhadap pembangunan

Jadi dapat dipahami bahwa partisipasi aktif ditandai dengan adanya suatu potensi menyeluruh dari anggota masyarakat baik itu berupa sikap mental (keyakinan), tingkah laku yang aspiratif, kesadaran dan kepedulian yang menyatu dalam gerak yang partisipatif dan reaktif terhadap pembangunan. Sedangkan partisipasi pasif ditandai dengan adanya sikap mental dan tindakan yang tidak berjalan secara selaras dimana terdapat suatu sikap mental yang menerima namun dari segi tindakannya terkadang melaksanakan dan terkadang acuh terhadap

pembangunan. Partisipasi terakhir adalah non partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi ini tidak memuat aspek yang terdapat pada kedua partisipasi diatas. Sehingga dari uraian disini partisipasi BPD sangat penting perannya dalam perencanaan sampai tahap pelaksanaan program. Untuk melihat partisipasi anggota BPD di Desa Bulang Kec. Gending dapat dilihat dalam tabel rencana dan realisasi pembangunan sebagai berikut:



Tabel 1. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Yang Dicapai pemerintah desa Dalam Pembangunan Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo Tahun 2001 (dalam ribuan)

NO	Nama Proyek	Rapat	Kehadiran	Tidak mendukung	Bantuan pemerintah		Biaya		Waktu (hari)		Hasil	
					Bantuan pemerintah	Target Swadaya Masyarakat	Target Swadaya Masyarakat	Realisasi Swadaya	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Perawatan jalan	3x	100%	0%	2500	3500	3500	3500	55	55	1	1
2	Lomba PHBN	2x	100%	0%	500	450	300	300	5	5	2	1
3	Rehabilitasi Masjid	2x	82%	18%	600	1000	1.000	1.000	10	10	1	1
4	Rehabilitasi Musollah	2x	90%	10%	400	500	500	500	7	7	1	1
5	Pelaksanaan Program PKK	2x	82%	18%	1.625	200	200	200	5	5	1	1
6	Posyandu	2x	82%	18%	250	100	100	100	3	3	5	5
7	Pelaksanaan Anak Remaja (kostum, sepatu)	2x	82%	18%	855	200	200	200	5	5	1	1
8	Hansip	2x	90%	10%	2.025	100	100	100	1	1	1	1
9	PJOK dan PJAK (penanggung jawab Ops dan Adm. Kelurahan)	2x	100%	0%	200	-	-	-	5	5	2	2

Sumber: Data sekunder desa Bulang tahun 2001

Berdasarkan tabel I tentang rencana dan realisasi pembangunan di Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo maka dapat dikatakan bahwa partisipasi anggota BPD dalam proses pengambilan keputusan dengan prosentase 80% dari jumlah kehadiran. rapat yang diikuti oleh anggota BPD dalam proses pengambilan keputusan sebanyak 9 kali. Dimana jumlah anggota BPD yang berjumlah 20 orang namun yang hadir rata-rata 16 orang saja pada tiap tiap rapat yang diselenggarakan. Dapat dikatakan bahwa partisipasi anggota BPD dalam pengambilan keputusan tidak begitu tinggi. Oleh karena itu diharapkan anggota BPD untuk lebih meningkatkan kinerja partisipasinya dalam program pembangunan.

Secara keseluruhan besarnya dana yang berasal dari pemerintah untuk tiap desa dan kelurahan sebesar 104. 957. 500 juta untuk periode Januari 2001- Desember 2001. Namun target swadaya masyarakat dan realisasinya kurang maksimal sehingga perlu peningkatan. Rendahnya tingkat partisipasi dari anggota BPD dalam proses pengambilan keputusan program pembangunan disebabkan rendahnya aktifitas ketua umum BPD dalam menggerakkan anggotanya.

Selanjutnya untuk mengetahui aktifitas ketua umum BPD dalam menggerakkan anggotanya, penulis menyajikan tentang rapat rutin yang diselenggarakan oleh Ketua umum BPD Desa. Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Rapat Kehadiran Ketua Umum BPD Tahun 2001

NO	Bulan	Kehadiran ketua umum		Kehadiran anggota BPD	
		Target	Realisasi	Undangan	Kehadiran
1	Januari	1 kali	1 kali	12orang	12 orang
2	Februari	1 kali	1 kali	12orang	12 orang
3	Maret	1 kali	1 kali	12orang	8 orang
4	April	1 kali	-	12orang	10 orang
5	Mei	1 kali	1 kali	12orang	12 orang
6	Juni	1 kali	1 kali	12orang	8 orang
7	Juli	1 kali	1 kali	12orang	12 orang
8	Agustus	1 kali	-	12orang	10 orang
9	September	1 kali	1 kali	12orang	12 orang
10	Oktober	1 kali	1 kali	12orang	12orang
11	Nopember	1 kali	1 kali	12orang	8 orang
12	Desember	1 kali	1 kali	12orang	12 orang

Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Bulang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan rapat rutin yang seharusnya dihadiri ketua umum BPD 12 kali ternyata hanya 10 kali yang dapat dipenuhi, sementara untuk memimpin penyelenggaraan rapat BPD selama ketua umum tidak dapat hadir diwakili ketua I dan ketua II.

Melihat tabel 2 diatas maka dapat dikatakan bahwa kurang aktifnya ketua umum BPD dalam meningkatkan partisipasi anggotanya, mengingat Jumlah prosentase kehadiran ketua umum BPD hanya mencapai 80%. Hal ini menimbulkan rendahnya kehadiran dari anggota BPD hanya mencapai sekitar 80%. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai partisipasi anggota BPD di Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo bahwa keberadaan BPD kurang berfungsi secara optimal dan kurang berfungsi sesuai harapan. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi anggota BPD dalam pengambilan keputusan yang belum maksimal mengenai jumlah kehadiran yaitu sekitar 80 % saja.

Hal ini bisa menimbulkan rendahnya semangat kerja anggota BPD. Kondisi yang demikian tentu memerlukan perilaku pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat Desa Bulang yaitu perilaku mendukung dan perilaku mengarahkan.

Guna menumbuhkan/meningkatkan partisipasi diperlukan perilaku mengarahkan dan mendukung. Apabila perilaku ketua BPD lemah tentu berakibat pada rendahnya partisipasi anggotanya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Hemhill & Coons (1957:7) mengenai definisi perilaku yaitu, "Suatu sikap dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama".

Dari latar belakang diatas kami mengambil judul: **Perilaku ketua Umum BPD untuk meningkatkan partisipasi anggotanya dalam pembangunan desa (studi tentang proses pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan program pembangunan didesa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo.**

1.2 Perumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka selanjutnya dalam suatu penelitian adalah merumuskan masalah. Menurut Surakhmad (1994:34) bahwa, "Masalah adalah setiap kesulitan yang mengarahkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila ingin berjalan terus".

Kriteria perumusan masalah yang baik seperti dijelaskan Loedin (1976:12) sebagai berikut:

1. Menunjukkan hubungan antara dua variabel/lebih
2. Persoalan harus ditegaskan dalam bahasa yang jelas untuk memudahkan dituangkan dalam kalimat
3. Persoalan harus memudahkan pengukuran empiris

Menurut Nasir (1988:143) umumnya rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi berikut:

1. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan
2. Rumusan masalah hendaknya jelas dan padat
3. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah
4. Masalah harus merupakan dasar bagi judul penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan pendapat-pendapat tentang perumusan masalah maka perlu adanya suatu rumusan masalah yang berisi data yang memungkinkan diukur secara empiris. Hal tersebut tidak lain disini adalah

perilaku. Dimana masalah perilaku ini berkaitan dengan proses menggerakkan partisipasi wakil dari anggota masyarakat sehingga timbulah masalah sebagai berikut: **Apakah ada pengaruh perilaku ketua BPD terhadap tingkat partisipasi anggotanya dalam proses pengambilan keputusan bagi program pembangunan didesa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo.**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Penulis ingin mengetahui perilaku ketua BPD yang dapat meningkatkan partisipasi anggotanya dalam proses pengambilan keputusan didesa Bulang
- b. Mengetahui tingkat partisipasi anggota BPD dalam proses pengambilan keputusan bagi program pembangunan didesa Bulang
- c. Mengetahui pengaruh perilaku ketua BPD terhadap tingkat partisipasi anggotanya dalam proses pengambilan keputusan bagi program pembangunan didesa Bulang

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah pengetahuan, sebagai sarana melatih diri dalam menganalisis persoalan dalam ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu administrasi negara
- b. Mampu menjadi masukan serta motivasi tersendiri bagi seluruh anggota BPD di desa Bulang terhadap pembangunan secara optimal
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mempertinggi khasanah kajian ilmiah sekaligus sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dibidang ilmu sosial dan politik.

1.4 Kerangka Teori

Pembangunan dinegara berkembang merupakan suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat dan tidak lepas dari peranan pemerintah, hal ini sesuai dengan pendapat Rahardjo (1999:192) bahwa, "Pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan rencanakan". Begitu pula paradigma pembangunan pada suatu rentang waktu mengalami pergeseran-pergeseran dan tergantikan dengan paradigma baru. Sesuai dengan yang dituturkan oleh Tjokrowinoto (1996:8) bahwa," Pergeseran paradigma pembangunan yang merentang dari paradigma pertumbuhan, paradigma kesejahteraan paradigma neo-ekonomi, paradigma dependensia sampai ke paradigma pembangunan manusia". Pergeseran tersebut merupakan hal alamiah yang terjadi terhadap paradigma pembangunan. Hal ini dimungkinkan adanya proses perkembangan wawasan, tolak ukuran perubahan sumberdaya pembangunan. Paradigma pembangunan manusia, dimana sumberdaya manusia memiliki posisi sentral dalam menopang kinerja pembangunan. Sebagaiman dikatakan Tjokrowinoto (1996:35) yaitu:

Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Titik tekannya adalah pada pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang diharapkan mampu mendorong tercapainya masyarakat desa yang berswasembada.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa salah satu unsur keberhasilan pembangunan desa tergantung pada kemampuan kader-kader pembangunan desa yang berkualitas dalam rangka tercapainya tujuan yang diterapkan.

Kader-kader pembangunan disini harus ditunjang dengan kemampuan yang profesional dalam mengelola proses pembangunan desa kearah pencapaian tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Robins (1996:39) yaitu," Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan.

Jadi pembentukan kader pembangunan desa yang ditunjang aspek kepemimpinan yang profesional akan memudahkan proses pencapaian kearah tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan disini berkaitan erat dengan dua teori yaitu teori ciri kepemimpinan dan teori perilaku kepemimpinan. Menurut Robins (1996:40-42) bahwa : Kepemimpinan dibagi menjadi dua teori dengan garis pemikiran sebagai berikut:

1. Teori ciri kepemimpinan adalah teori yang mencari ciri kepribadian, sosial, fisik atau intelektual yang membedakan pemimpin dengan bukan pemimpin. Dalam teori ciri kepemimpinan ini diidentifikasi ciri yang dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan seperti ambisi, energi hasrat untuk memimpin, kejujuran, integritas, percaya diri, kecerdasan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan.
2. Teori perilaku kepemimpinan adalah teori yang mengungkapkan perilaku spesifik membedakan pemimpin dengan bukan pemimpin.
Teori ini ditandai dengan :
 - a. Struktur awal yaitu mengacu sejauh mana pimpinan menetapkan dan menstruktur peranannya dan peran bawahan untuk mencapai tujuan. Struktur ini mencakup perilaku yang berusaha mengorganisasi kerja, hubungan kerja dan tujuan.
 - b. Pertimbangan (*consideration*) yaitu sejauh mana seorang pemimpin berkemungkinan memiliki hubungan pekerjaan yang saling percaya, menghargai gagasan bawahan dan memperhatikan perasaan mereka.

Dari uraian diatas jelas bahwa kepemimpinan dibagi menjadi dua teori dimana teori ciri kepemimpinan merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang ciri-ciri atau kondisi internal dari seorang pemimpin yang membedakan dengan bukan pemimpin. Sedangkan pada teori perilaku kepemimpinan dapat dikatakan bahwa teori ini mengkaji tentang perilaku perilaku tertentu ciri atau karakter dari pemimpin sehingga membedakan dengan yang bukan pemimpin.

Perilaku tersebut ditandai dengan struktur awal dan pertimbangan. Struktur awal merupakan perilaku dimana pemimpin menetapkan dan menstruktur peran bawahannya, hubungan kerja dan tujuan. Sedangkan pertimbangan merupakan perilaku dimana pemimpin menciptakan hal-hal yang menghargai bawahannya seperti mendengar ide, perasaan bawahan dan saling percaya. Jadi teori perilaku kepemimpinan ini mempelajari bagaimana perilaku pemimpin mengelola bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Dalam kajian yang penulis lakukan, penulis lebih memfokuskan pada teori perilaku kepemimpinan sebab perilaku kepemimpinan mendasari fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu aspek perilaku pemimpin atau ketua umum BPD dalam upaya peningkatan partisipasi anggota BPD dalam pembangunan desa.

yang penulis lakukan yaitu aspek perilaku pemimpin atau ketua umum BPD dalam peningkatan partisipasi anggotanya dalam pembangunan desa.

Menurut Stephen P. Robins (1996:45-54) Teori perilaku kepemimpinan terbagi menjadi lima pendekatan yang memperoleh pengakuan secara luas:

1. Model Fielder
2. Teori Pertukaran Pemimpin-Anggota
3. Model Jalur Tujuan
4. Teori Situasional Hersey dan Blanchard

1. Model Kemungkinan Fielder

Model fielder yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa kelompok efektif bergantung pada padanan yang tepat antara gaya interaksi dari si pemimpin dengan bawahannya serta sampai tingkat mana situasi itu memberikan kendali dan pengaruh pada pemimpin.

Fielder mengembangkan suatu instrumen yang disebutnya questioner LPC (kuesioner rekan-sekerja yang paling kurang disukai:- least preferred coworker) yang bermaksud mengukur apakah seseorang berorientasi tugas atau hubungan. Kemudian ia membagi tiga kriteria; situasional hubungan pemimpin-anggota, struktur tugas, dan kekuasaan posisi- yang diyakini menciptakan keseimbangan yang tepat antara orientasi perilaku dari pemimpin itu. Pembagian model Fielder ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi gaya kepemimpinan
Fielder yakin bahwa faktor utama dalam sukses kepemimpinan adalah gaya dasar kepemimpinan individu.
- b. Mendefinisikan situasi
Setelah gaya dasar kepemimpinan dasar seseorang individu dinilai. Fielder mengidentifikasi tiga dimensi kemungkinan yang menentukan keefektifan kepemimpinan yaitu
 - Hubungan pemimpin-anggota: Tingkat keyakinan, kepercayaan, respek bawahan terhadap pimpinan mereka.
 - Struktur tugas: Sejauh mana tingkat penugasan diprosedurkan
 - Kekuasaan posisi: Tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang pemimpin terhadap variabel kekuasaan seperti mempekerjakan, memecat, mendisiplinkan dan mempromosikan dan menaikkan gaji mereka.

Dengan kata lain Situasi akan dapat menyenangkan pemimpin jika ketiga dimensi diatas memiliki derajat tinggi. Dengan kata lain, suatu situasi akan menyenangkan jika:

- a. Pemimpin diterima oleh pengikutnya (derajat dimensi pertama tinggi)
- b. Tugas-tugas dan semua yang berhubungan dengannya ditentukan secara jelas (derajat dimensi kedua tinggi)
- c. Penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal diterapkan pada posisi pemimpin.(derajat dimensi ketiga juga tinggi)

Jikalau yang timbul sebaliknya, maka menurut Fielder akan tercipta suatu situasi yang tidak menyenangkan bagi pemimpin. Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa Fielder benar-benar yakin bahwa kombinasi antara situasi yang menyenangkan dan gaya kepemimpinan akan menentukan efektifitas kerja.

2. Teori Pertukaran Pemimpin-Anggota

Teori pertukaran pemimpin-anggota (LMX, leader member exchange) berpendapat bahwa karena tekanan waktu, para pemimpin membangun suatu hubungan yang istimewa dengan kelompok kecil bawahan mereka. Individu-individu inimenyusun kelompok -dalam- mereka dipercaya, mendapat sejumlah perhatian yang tidak proposional dari sipemimpin, dan berkemungkinan besar mendapat hak istimewa. Bawahan yang lain berada dalam kelompok luar. Mereka memperoleh lebih sedikit waktu dari pemimpin, lebih sedikit ganjaran yang disukai dikendalikan oleh pemimpin dan mendapatkan hubungan atasan-bawahan yang didasarkan pada interaksi otoritas yang formal. Teori ini mengungkapkan bahwa awai sekali dalam sejarah interaksi antara seorang pemimpin dan bawahan, si pemimpin secara eksplisit mengkategorikan seorang bawahan itu sebagai orang dalam atau luar dan bahwa hubungan itu relatif mantap sejalan dengan berjalannya waktu. Tepatnya bagaimana seorang pemimpin memilih siapa yang masuk tiap kategori tidaklah jelas, tetapi ada bukti bahwa pemimpin cenderung memilih anggota kelompok dalam karena mereka mempunyai karakteristik pribadi yang serupa dengan pemimpin, tingkat kompetensi yang lebih tinggi dari anggota kelompok luar.

Menurut Graen (1996:51) yaitu :

Teori pertukaran pemimpin-anggota menjelaskan pemimpin menciptakan dalam dan kelompok luar, dan bawahan dengan status kelompok dalam akan mempunyai kinerja yang lebih tinggi, tingkat keluarnya karyawan yang lebih rendah dan kepuasan yang lebih besar bersama atasan mereka.

Jadi lebih spesifik, teori ini memberi bukti substantif bahwa para pemimpin memang membedakan bawahan, bahwa disparitas (penyimpangan ini jauh dari bersifat acak, dan bahwa status kelompok dalam dan kelompok luar dikaitkan dengan kinerja dan kepuasan karyawan.

3 Model Jalur Tujuan (Path-Goal)

Menurut House (1996:52),” Teori jalur tujuan yaitu teori dimana seorang pemimpin dapat diterima baik oleh bawahan sejauh mereka pandang sebagai suatu sumber dari atau suatu kepuasan segera atau kepuasan masa depan”.

Model jalur tujuan merupakan suatu model kemungkinan dari kepemimpinan yang menyuling unsur-unsur utama dari riset kepemimpinan Ohio mengenai struktur awal dan pertimbangan serta teori pengharapan dari motivasi.

Adapun model Path-Goal menurut House (1996:52) terdapat empat tipe kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan direktif: Tipe ini sama dengan model kepemimpinan yang otokratis dari Lipitt dan White. Bawahan tahu senyatanya apa yang diharapkan darinya dan pengarahan khusus yang diberikan pemimpin. Model ini tidak ada partisipasi.
- b. Kepemimpinan yang mendukung yaitu Pemimpin memiliki kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat dan perhatian.
- c. Kepemimpinan partisipatif yaitu Pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran bawahan.
- d. Kepemimpinan yang berorientasi prestasi yaitu pemimpin berusaha meningkatkan partisipasi anggota dengan menetapkan serangkaian tujuan.

Menurut model Path-goal ini macam-macam gaya kepemimpinan tersebut dapat terjadi dan dipergunakan senyatanya oleh pemimpin yang sama dalam situasi yang berbeda.

Dua diantara faktor-faktor situasional yang telah diidentifikasi sejauh ini adalah sifat personal dari bawahan, dan tekanan dari lingkungannya dengan tuntutan-tuntutan yang dihadapi oleh bawahan. Untuk situasi pertama teori path-

goal memberikan penilaian bahwa: perilaku pemimpin akan bisa diterima oleh bawahan jika bawahan melihat bahwa perilaku tersebut akan merupakan sumber yang segera bisa memberikan kepuasan atau sebagai suatu instrumen bagi kepuasan-kepuasan masa depan. Adapun faktor situasional kedua, Path-goal menyatakan bahwa perilaku pemimpin akan bisa menjadi faktor motivasi (misalnya menaikkan usaha bawahan) terhadap para bawahan jika:

1. Perilaku tersebut dapat memuaskan kebutuhan bawahan sehingga memungkinkan tercapainya efektifitas dalam pelaksanaan kerja.
2. Perilaku tersebut merupakan komplimen dari lingkungan para bawahan yang berupa memberikan latihan, dukungan, dan penghargaan yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja.

Dengan menggunakan salah satu dari empat gaya diatas dan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti yang diuraikan tersebut, maka pemimpin berusaha mempengaruhi persepsi bawahannya dan memotivasinya dengan mengarahkan mereka pada kejelasan tugas-tugasnya, pencapaian tujuan, kepuasan kerja, pelaksanaan kerja yang efektif. Adapun usaha-usaha yang lebih spesifik yang dapat dicapai oleh pemimpin antara lain:

1. Mengetahui dan atau menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan para bawahan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dikontrol pimpinan.
2. Memberikan insentif kepada yang mampu mencapai hasil dalam bekerja
3. Membuat suatu jalan yang mudah dilewati oleh bawahan untuk menaikkan prestasi dengan jalan latihan dan pengarahan
4. Membantu bawahan menjelaskan apa yang bisa diterapkan darinya.
5. Mengurangi halangan-halangan yang bisa mengurangi stres
6. Menaikkan kesempatan untuk pemuasan bawahan yang memungkinkan tercapainya efektifitas kerja.

Dengan kata lain dengan cara-cara seperti yang diuraikan diatas pemimpin berusaha membuat jalan kecil (path) untuk mencapai tujuan (goal) para bawahan sebaik mungkin.

4. Teori Situasional Hersey dan Blanchard

Kepemimpinan situasi menurut Hersey dan Blanchard adalah didasarkan pada berhubungannya diantara hal-hal berikut ini:

- a. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan pemimpin
- b. Jumlah dukungan sosioemosional yang diberikan oleh pemimpin

- c. Tingkat kesiapan atau kematangan anggota yang ditunjukkan melalui tugas khusus, fungsi atau tujuan tertentu.

Menurut Hersey dan Blanchard dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap pengikut atau bawahannya, yaitu Perilaku mengarahkan dan Perilaku mendukung.

Adapun pengertian dari perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung yaitu sebagai berikut:

- a. Perilaku mengarahkan adalah Sejauh mana seorang pemimpin melibatkan dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain, menetapkan peranan yang harus dilaksanakan oleh anggota, memberi tahu anggota tentang apa yang harus dilaksanakan, dimana melaksanakan hal tersebut, bagaimana melaksanakannya dan melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap anggota.
- b. Perilaku mendukung adalah Sejauh mana pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah misalnya, mendengar, menyediakan dukungandan dorongan, memudahkan interaksi dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan.

Dari teori Hersey dan Blanchard diatas jelas bahwa pemimpin haruslah memiliki dua perilaku dalam meningkatkan kinerja anggotanya untuk memacu partisipasi anggota BPD yaitu melalui perilaku mendukung dan perilaku mengarahkan. Sedangkan menurut Thoha (1995:278) menyatakan sebagai berikut:

- a. Perilaku mengarahkan adalah Sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi satu arah
- b. Perilaku mendukung adalah Sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah.

Sebagai mana yang disampaikan Sayless (1986:156) bahwa,

“Perilaku pimpinan adalah suatu sikap yang diwujudkan oleh pemimpin baik melalui ucapannya maupun melalui perbuatannya agar bawahan mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpinnya”.

Adapun perilaku menurut Siagian (1993:120) adalah, “Keseluruhan tabiat dan sikap seseorang yang tercermin dalam ucapan dan tindakannya sebagai anggota organisasi”. Jadi agar bawahan mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpinnya maka hendaknya pola sikap dan perilakunya harus secara aktif mendukung dan memberikan pengarahan pada anggota masyarakat. Keberhasilan

kinerja pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perilaku dari kader-kader pembangunan desa yang berkualitas namun juga tergantung pada tingkat partisipasi masyarakatnya. Cohen dan Uphoff (1977:6) dalam bukunya yang berjudul *Rural development participation* mengungkapkan partisipasi sebagai berikut:

Participation including peoples involvement in decision making proses about would be done and how, their involvement in implementing programs decision by contributing various resources or cooperating in specific organisation or activity, their sharing in the benefit of development in evaluatif such programs.

Uraian diatas berarti bahwa partisipasi meliputi keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, mengambil manfaat dari pembangunan dan keterlibatan dalam usaha mengevaluasi setiap program. Sedangkan menurut Westa (1981:2) ialah, "Partisipasi ialah penyertaan emosi dan pikiran dari pekerja-pekerja dalam situasi kelompok yang mendorong agar mereka mengambil kemampuan kearah tujuan kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok itu". Jadi untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa tentu harus melibatkan wakil anggota masyarakat secara luas. Adapun teori yang menghubungkan perilaku dan partisipasi diungkapkan oleh Thoha (1996:286) sebagai berikut, "Dengan perilaku pemimpin, partisipasi mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi untuk diterapkan bagi anggota". Dengan kata lain perilaku yang positif mampu meningkatkan partisipasi anggota. Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard (1995:112) bahwa, "Konsep perilaku yang adaptif merupakan konsep dimana pimpinan memiliki perilaku adaptif untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan anggota, cenderung akan makin efektif dalam meningkatkan upaya/partisipasi untuk mencapai tujuan organisasi". Dari kedua teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pemimpin akan meningkatkan partisipasi anggota.

1.5 Konsepsi Dasar

Konsepsi dasar memegang peranan yang penting sebab konsepsi merupakan serangkaian konsep merupakan serangkaian konsep yang melandasi cara berpikir dalam suatu penelitian dan menjelaskan fenomena. Supranoto (1986:11) menyatakan, "Konsepsi dasar merupakan pondasi yang teoritis dan definisi singkat yang merdasari penilaian dan pemikiran kita guna mencapai jalan keluarnya atau suatu pemecahan dari persoalan yang diteliti". Tujuannya dapat untuk menyederhanakan pemikiran kita dengan jalan menggabungkan sejumlah penemuan atau peristiwa. Dari pendapat diatas dapat diketahui konsepsi dasar merupakan definisi singkat yang melandasi aspek penilaian dan pemikiran dalam mencapai solusi atas sebuah persoalan. Sedangkan teori menurut Singarimbun dan Effendi (1989:37) sebagai berikut, "Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontruksi, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial serta sistematis dengan cara merumuskan antar konsep". Sedangkan konsep menurut Singarimbun dan Effendi (1989:34) bahwa, "Konsep adalah abstraksi dari suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu". Dari uraian diatas jelas bahwa konsepsi dasar merupakan landasan kerangka berpikir untuk memecahkan suatu masalah.

1.5.1 Konsep Perilaku Pemimpin

Pada dasarnya perilaku pemimpin merupakan suatu sikap dan tindakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahan guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Disini pemimpin merupakan motor penggerak bagi alat-alat atau sumberdaya fisik maupun sumberdaya manusia. Menurut Siagian (1993:120), "Perilaku adalah keseluruhan tabiat dan sikap seseorang yang tercermin dalam ucapan dan tindakannya sebagai anggota organisasi". Perilaku pemimpin adalah suatu sikap yang diwujudkan oleh pemimpin baik melalui perbuatannya agar bawahan mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Jadi agar bawahan mau mengikuti kehendak pimpinan maka

hendaknya pola sikap dan tindakannya harus secara aktif mendukung dan memberikan pengarahan pada anggotanya.

Penerapan perilaku pemimpin bukan merupakan perilaku yang dilakukan menurut hawa nafsunya sendiri, namun dilandasi oleh suatu wawasan pimpinan terhadap kebutuhan masyarakat agar semua program dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam kerangka ini perlu diwujudkan pola hubungan yang selaras antara ketua BPD dengan anggotanya dengan memperhatikan batas-batas kewenangan kedua belah pihak. Disini pemimpin adalah seseorang yang memiliki kelebihan sehingga ia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk menggerakkan bawahan kearah pencapaian tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya melalui sikap dan perilaku yang berkualitas kepada bawahannya. Menurut Thoha (1996:278) sebagai berikut, "Dalam hubungan dengan perilaku pemimpin ini ada dua hal yang biasanya dilakukan olehnya terhadap bawahannya, yaitu perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung".

Berdasarkan pengertian perilaku kepemimpinan Thoha, maka penulis dalam penelitian ini mengambil indikator dari variabel X yaitu:

- a. Perilaku mengarahkan/tugas ()
- b. Perilaku mendukung/hubungan ()

a. Indikator Perilaku mengarahkan/tugas ()

Pemimpin pada dasarnya harus dapat mengorganisasikan dan menjelaskan tugas dari anggota kelompok. Hal ini penting peranannya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Thoha (1996:278) mengemukakan sebagai berikut, "Perilaku mengarahkan tugas dapat dirumuskan sejauh mana sebagai seseorang melibatkan dalam komunikasi satu arah". Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan oleh pengikut, memberikan pengikut tentang apa yang bisa dikerjakan, dimana melakukan kegiatan tersebut, bagaimana melaksanakan serta pengawasan secara ketat kepada pengikut. Sedangkan Hersey dan blanchard

(1995:64) mengemukakan bahwa, " Perilaku mengarahkan adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan dalam komunikasi satu arah". Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain, menetapkan peranan yang harus dilaksanakan oleh anggota, memberi tahu anggota tentang apa yang harus dilaksanakan, dimana melaksanakan hal tersebut, bagaimana melaksanakannya dan melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap anggota.

Jadi pada dasarnya perilaku tugas adalah suatu sikap dan tindakan pemimpin untuk menggerakkan dan mengatur kegiatan bawahan. Perilaku tersebut disertai penjelasan (bagaimana) secara rinci terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian tugas/pekerjaan sehingga akan tercapai tujuan organisasi

b Indikator Perilaku Mendukung/hubungan

Dalam jenis perilaku ini pemimpin harus mengembangkan kepemimpinan efektif melalui sikap yang memperlihatkan kepercayaan dan rasa dipercaya, bertindak ramah dan penuh perhatian, mencoba mengerti masalah bawahan, membantu mengerti bawahan dan meningkatkan karir mereka, selalu memberi informasi pada bawahan dan memberi pengakuan terhadap keberhasilan mereka.

Sesuai dengan pendapat Thoha (1996:279) sebagai berikut:

Perilaku mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi dan melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard (1995:64) mengemukakan bahwa:

Perilaku mendukung adalah Sejahtera mana pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian karakteristik pemimpin yang menerapkan perilaku hubungan ini menunjukkan sikap dan tindakan yang selalu memberi perhatian terhadap anggotanya, membuka komunikasi bagi pemecahan masalah, memberi ide pemecahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh anggotanya.

1.5.2 Partisipasi anggota badan perwakilan desa (BPD) pembangunan desa (Y)

Partisipasi merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan. Demikian pula dengan pembangunan di desa, tanpa sikap dinamis dari wakil-wakil anggota masyarakat terhadap pembangunan memungkinkan terbangkalainya program-program pembangunan di desa, sebab kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana dan tenaga ahli sangat terbatas. Hal ini menyebabkan peran aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung pembangunan di desa. Diungkapkan oleh Westra (1981:2) bahwa, "Situasi kelompok yang Partisipasi adalah penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja dalam mendorong agar mereka mengembalikan kemampuan kearah tujuan kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok itu". Jadi untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa sudah tentu membutuhkan peran yang dinamis dari wakil-wakil anggota masyarakat. Pentingnya partisipasi dikemukakan juga oleh Nitisemoto (1998:128) bahwa, "Partisipasi merupakan salah satu cara memotivasi yang mempunyai ciri lain dari yang lain". Hal ini disebabkan oleh peningkatan partisipasi lebih ditingkatkan pada aspek psikologis dari pada sisi materi dengan melibatkan seseorang didalamnya. Maka orang tersebut akan ikut bertanggung jawab. Berbicara mengenai partisipasi anggota BPD dalam pembangunan dapat terwujud dalam dua bentuk. Hal ini dijelaskan oleh Koentjoroningrat (1997:65) yang terwujud kedalam dua bentuk yaitu:

- a. Aktivitas bersama yaitu wakil-wakil rakyat diajak oleh berbagai kalangan pemerintah untuk menyumbangkan tenaga dan materi untuk proyek yang bersifat fisik.
- b. Aktifis pribadi/individu tidak terdapat aktivitas khusus secara bersama-sama dimana rakyat ikut serta bukan karena paksaan melainkan kemauan diri.

Jadi dari latar belakang diatas maka yang paling tepat disini adalah partisipasi wakil-wakil anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan pengambilan keputusan menurut Tjokrowinoto (1977:24) sebagai berikut:

Penyertaan mental dan emosi seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka menyumbangkan daya pikiran dan perasaan bagi tercapainya keputusan diatas dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan untuk mencurahkan daya pikiran, perasaan disertai dengan penyertaan mental dan emosi yang positif bagi tercapainya tujuan pembangunan yang dilaksanakan.

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan atau dugaan yang sifatnya sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Kesimpulan atau dugaan itu bisa benar ataupun salah. Jika dugaan benar maka akan diterima dan sebaliknya. Menurut Winarno (1990:68) sebagai berikut, "Hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan itu belum final, masih harus dibuktikan lagi kebenarannya". Hipotesis adalah suatu dugaan yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar.

Dalam rangka mempermudah pengujian agar hipotesis dapat diterima, perlu dirumuskan kedalam beberapa kriteria yang baik. Menurut Singarimbun (1986:22) menyatakan bahwa, kriteria perumusan hipotesis yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Hipotesis harus menggambarkan hubungan diantara dua variabel
2. Hipotesis harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Ini berarti bahwa variabel yang dicantumkan dalam hipotesis harus dapat diukur dengan benar serta arah hubungan antara dua variabel tersebut harus jelas.

Secara garis besar hipotesis dibedakan menjadi dua macam yaitu hipotesis nol (H_0) yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada saling hubungan antara dua variabel atau lebih dan hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan adanya saling hubungan antara dua unsur atau lebih untuk memilih mana diantara kedua macam hipotesis yang akan digunakan. Menurut Depertemen pendidikan dan kebudayaan tinggi (1997:38) dinyatakan sebagai berikut, "Sering timbul pertanyaan mengenai mana diantara kedua macam hipotesis yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang harus dirumuskan sebagai hipotesis penelitian". Jawaban terhadap penilaiannya ini sangat tergantung pada landasan teoritis yang dipergunakan. Jika landasan teoritis itu mengarahkan pada kesimpulan" tidak ada

pengaruh atau tidak ada perbedaan" maka hipotesis penelitian yang dirumuskan akan merupakan hipotesis nol. Sebaliknya jika ke "ada pengaruh" maka hipotesis penelitian yang dirumuskan merupakan hipotesis alternatif.

Berdasarkan uraian diatas jika teori banyak menyatakan pada kesimpulan tidak ada korelasi/tidak ada perbedaan maka hipotesis nol sebaliknya. Namun jika teori mengarahkan pada kesimpulan kearah hubungan atau keadaan perbedaan maka hipotesis penelitian merupakan hipotesis alternatif yang dalam hal ini tidak mencari hubungan melainkan melihat bagaimana hubungan tersebut sebagaimana yang jelas ada dalam teori.

Sehingga karena landasan teori itu mengarahkan pada kesimpulan ke" pengaruh" maka hipotesis penelitian yang dirumuskan merupakan hipotesis alternatif (H_a), maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_a : jika perilaku ketua umum BPD selalu melaksanakan fungsi tugas dan hubungan sesuai dengan kondisi yang diinginkan, maka akan semakin meningkatkan partisipasi anggotanya dalam proses pengambilan keputusan di desa Bulang.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dipergunakan untuk memudahkan pengukuran masing-masing variabel didalam penelitian melalui indikator-indikator. Singarimbun dan Effendi (1989:46) mengungkapkan bahwa, "Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama". Dari informasi tersebut ia akan tahu bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, guna membatasi secara tegas konsep atau variabel penelitian yang dirumuskan dalam hipotesis serta agar dapat diukur secara empirik, maka dalam penulisan ini yang perlu dioperasikan adalah,

1. Variabel perilaku ketua umum BPD (X)
2. Variabel partisipasi anggota BPD dalam pembangunan desa (Y)

1.7.1 Operasionalisasi variabel Pengaruh perilaku ketua umum BPD (X)

Perilaku pemimpin merupakan suatu karakter yang meliputi ucapan maupun perbuatannya dalam usaha mendukung keberhasilan roda organisasi sesuai persepsi dan keinginan pemimpin yang bersangkutan.

Definisi operasional dalam variabel perilaku pemimpin dalam penelitian ini terdiri dua indikator yaitu perilaku mengarahkan/tugas dan perilaku mendukung/ hubungan yang akan diuraikan dalam keterangan sebagai berikut:

a. Perilaku mengarahkan/tugas (X1)

Perilaku mengarahkan tugas adalah sejauh mana seseorang melibatkan dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain menetapkan peranan yang harus dikerjakan oleh bawahan, memberikan pengikut tentang apa yang bisa dikerjakan, dimana melakukan kegiatan tersebut, bagaimana melaksanakan serta pengawasan secara ketat kepada pengikut (Thoha, 1996:278) untuk mengukur indikator perilaku mengarahkan/tugas ini dapat digunakan item-item sebagai berikut:

1. Pemimpin menetapkan jenis tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh anggotanya
2. Pemimpin memberitahukan kepada anggotanya tentang kapan dan dimana melaksanakan tugas
3. Pemimpin memberikan ketetapan waktu penyelesaian suatu tugas pekerjaan pada anggotanya
4. Pemimpin memberitahukan tentang tata cara melaksanakan tugas pekerjaan kepada anggotanya
5. Pemimpin memberikan pengawasan atas tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggotanya

b. Perilaku mendukung/hubungan (X2)

Perilaku mendukung adalah sejauh mana pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi dan melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengukur indikator perilaku mendukung/hubungan ini dapat digunakan item-item sebagai berikut:

1. Pemimpin mendengarkan anggotanya dengan jalan mendengarkan ide-ide mereka demi kebaikan bersama
2. Pemimpin menyediakan dukungan dan dorongan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa
3. Pemimpin membina hubungan yang harmonis dengan jalan berinteraksi dengan anggotanya
4. Pemimpin melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan

1.7.2 Operasionalisasi Variabel terpengaruh partisipasi anggota BPD dalam pembangunan desa (Y)

Pelaksanaan pembangunan desa memerlukan peran aktif dari seluruh komponen yang ada disuatu desa, tanpa itu semua program pembangunan desa yang telah dirancang mustahil mencapai sasaran yang diinginkan. Partisipasi disini sangat urgen dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan terutama partisipasi anggota BPD dalam proses pengambilan keputusan, sebab pada dasarnya hasil-hasil pembangunan nantinya kembali pada masyarakat.

Dengan berpijak pada pendapat Cohen dan Uphoff dalam konsepsi diatas maka penulis hanya memfokuskan pada proses pengambilan keputusan. Untuk mengukur indikator proses pengambilan keputusan ini dapat digunakan item-item sebagai berikut:

- a. Kesiediaan anggota BPD untuk menyumbangkan ide, gagasan yang tepat dengan situasi dan kebutuhan masyarakat
- b. Kesiediaan anggota BPD untuk menyumbangkan informasi dan masalah serta pemecahannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat
- c. Kesiediaan anggota BPD dalam menyusun rencana dan ikut dalam pembuatan keputusan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mempermudah pengukuran variabel-variabel yang terbagi dalam berbagai indikator diatas maka perlu dilakukan perhitungan dengan memberikan

nilai atau skor dari masing-masing item yang teruji dengan menggunakan ukuran sebagai berikut:

- a. Skor 2 untuk jawaban "ya"
- b. Skor 1 untuk jawaban "tidak"

Setelah dilakukan perhitungan skor untuk masing-masing variabel, selanjutnya membagi total skor tersebut kedalam dua kategori yaitu kategori tinggi dan rendah.

Untuk variabel ketua umum BPD, indikator perilaku mengarahkan/tugas terdapat 5 item dan indikator perilaku mendukung/hubungan terdapat 4 item. Sehingga terdapat total skor tertinggi 18 dan terendah 9, maka:

- a. Total skor 9-13 termasuk kategori rendah
- b. Total skor 14-18 termasuk kategori tinggi

Untuk variabel partisipasi anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), indikator proses pengambilan keputusan terdapat 3 item,

- a. Total skor 3-4 termasuk kategori rendah
- b. Total skor 5-6 termasuk kategori tinggi

sehingga terdapat total skor tertinggi 6 dan terendah 3, maka:

1.8 Metode penelitian

Dalam menguraikan fenomena dalam suatu penelitian yang kompleks, diperlukan suatu cara dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian. Untuk itulah dalam suatu penelitian diperlukan metode atau tehnik baik dalam analisis data maupun penulisannya. Dalam hal ini Surakhmad (1990:131) menguraikan, "Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan menggunakan tehnik serta alat-alat tertentu". Sedangkan penelitian menurut Marzuki (1985:5) sebagai berikut:

- a. Usaha untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, menemukan /mengembangkan /menguji kebenaran
- b. Dengan cara atau kegiatan mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data (informasi dan keterangan)
- c. Dikerjakan dengan sabar, hati-hati, sistematis dan berdasarkan ilmu pengetahuan (dengan metode ilmiah)

Jadi melalui metode ilmiah akan dapat ditempuh prosedur yang benar dalam analisis data, penulisan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penentuan populasi
2. Metode penentuan sampel
3. Metode pengumpulan data
4. Metode analisis data

1. Penentuan populasi

Penentuan populasi dapat diartikan sebagai wilayah tertentu yang dapat diperlukan sebagai suatu daerah penelitian.

Pengertian populasi menurut Singarimbun dan Effendi (1989:152) sebagai berikut, "Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga". Populasi dapat dibedakan antara populasi sampling dan populasi sasaran.

a. Populasi sampling

Dalam menentukan populasi sampling penulis menetapkan sampel yang akan diambil adalah semua anggota BPD di Desa Bulang

b. Populasi sasaran

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah semua anggota BPD yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terdiri dari anggota BPD yang berjumlah 20 orang.

2. Metode penentuan sampel

Untuk memperoleh data yang mampu mendeskripsikan sifat dari keseluruhan populasi maka seorang peneliti perlu menetapkan sampel. Sampel adalah kelompok atau wakil dari populasi yang jumlahnya besar, Hadi (1989:6) mengatakan, "Populasi sebagai sampel". Dalam penelitian berapa jumlah sampel yang akan diambil oleh seorang peneliti tidak ada ketentuan khusus, sebab peneliti lah yang menentukan. Sebagaimana pendapat Hadi (1989:73) bahwa,"

Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus yang mutlak berapa persen suatu sampel yang harus diambil dari populasi, Ketidakadaan ketetapan ini tidak perlu menimbulkan keragu-raguan seorang peneliti".

Meski tidak disebut berapa jumlah sampel yang akan diambil namun ketepatan dalam mengambil jumlah sampel akan dapat menggambarkan sifat dan karakteristik populasi. Singarimbun dan Effendi (1989:106-107) menyebutkan, Metode pengambilan sampel yang ideal harus memenuhi syarat,

- a. Sederhana sehingga mudah dilaksanakan
- b. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya rendah
- c. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi
- d. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian yang menentukan penyimpangan baku (standart) dari taksiran yang diperoleh.

Dari kedua pendapat diatas bisa ditarik suatu gerak yang selaras, fleksibel bagi peneliti dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Namun fleksibilitas disini hendaknya juga memperhatikan (besar dan kecilnya) takaran dari sampel yang akan diambil. Hal ini perlu agar sampel tersebut mampu menggambarkan dan mewakili sifat yang dimiliki oleh suatu populasi, sehingga diperoleh data-data yang memberi tingkat kevalidan bagi hasil penelitian. Adapun dalam penentuan besarnya jumlah sampel, penulis menggunakan tehnik sensus. Pengambilan sampel secara keseluruhan ini dipilih sebab responden dianggap mampu memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti. Adapun jumlah sampel yang penulis ambil disini berjumlah 20 orang. Dua puluh orang disini merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah anggota BPD Desa Bulang

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan dalam penelitian untuk mencapai data yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun tehnik yang dipakai untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Tehnik observasi
- b. Tehnik interview
- c. Tehnik kuesioner

d. Teknik dokumentasi

a. Teknik observasi

Sering kali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yaitu memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam pengertian secara psikologis, menurut Arikunto (199:146), "Observasi adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera".

Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap dan perasa.

Menurut Arikunto (1998:147) Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi yaitu:

1. Observasi Non Sistematis, Yang dilakukan pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
2. Observasi Sistematis, Yang dilakukan pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

Melalui tehnik observasi ini pengamatan langsung ke obyek penelitian, dengan tujuan untuk mengamati dan mempelajari semua gejala yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Hadi (1989:36) bahwa, "Sebagai suatu metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki". Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan sendiri melainkan dengan semua jenis pengamatan yang dilakukan secara langsung. Dengan demikian dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung, diamati dan dicatat semua hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Teknik interview

Tehnik ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada responden tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan data-data penelitian, yang tentunya bertujuan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

Lebih lanjut Hadi (1989:192) mengatakan, "Interview adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung

secara fisik yang satu dapat melihat dan yang lain mendengarkan dengan telinga sendiri". Jadi interview merupakan alat mengumpulkan informasi secara langsung tentang beberapa jenis penelitian sosial.

Dengan kata lain interview adalah suatu tehnik mengumpulkan data atau informasi dengan mewawancarai responden atau bisa juga disebut face to face.

Sedangkan menurut Arikunto (1998:145), " Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara"

Dikatakan lebih lanjut bahwa kegunaan dari interview adalah untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian dan sikap terhadap sesuatu. Menginterview bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini pewawancara harus menciptakan suasana yang santai tetapi serius artinya wawancara tersebut dilakukan dengan tidak main-main.

c. Tehnik kuesioner

Tehnik ini merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan daftar pertanyaan dalam bentuk tertulis yang harus dijawab oleh responden. Hal ini sesuai dengan pendapat Singarimbun dan Effendi (1989:175) bahwa:

Tujuan pokok pembuatan kuesioner:

1. Untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan survey
2. Untuk mendapatkan informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin

Sedangkan kuesioner menurut Koentjoroningrat (1997:87) yaitu, "Kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau bidang". Dengan demikian kuesioner dimaksudkan sebagai daftar pertanyaan untuk mendapatkan data berupa jawaban-jawaban dari responden.

Sedangkan menurut Arikunto (1998:140) Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Kuesioner dapat dibeda-bedakan atas beberapa jenis, tergantung pada sudut pandangnya:

1. Dipandang dari cara menjawab, ada dua yaitu:
 - a. Kuesioner terbuka, memberi kesempatan pada responden menjawab dengan kalimatnya sendiri
 - b. Kuesioner tertutup, responden tinggal menjawab jawaban yang disediakan
 2. Dipandang dari jawaban yang diberikan
 - a. Kuesioner langsung, responden menjawab tentang dirinya
 - b. Kuesioner tidak langsung, responden menjawab tentang orang lain
 3. Dipandang dari bentuknya
 - a. Kuesioner pilihan ganda
 - b. Kuesioner isian
 - c. Check list
 - d. Rating- Scale
- (Arikunto, 1998: 140-141)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kuesioner adalah tehnik pengumpulan data melalui bentuk daftar pertanyaan secara tertulis yang diserahkan dan harus dijawab oleh responden. Sehingga dapat diperoleh data yang valid, relevan dan aktual dalam analisis pengujian kebenaran atau hipotesis.

d. Tehnik dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (1998:149) berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi metode dokumentasi yaitu, "Suatu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian".

Jadi dokumentasi merupakan suatu tehnik penggalian informasi melalui dokumen. Dokumen ini dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap suatu masalah yang diteliti. Menurut Koentjoroningrat (1997:66) bahwa "Pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan alat untuk mempelajari permasalahan, antara lain karena tidak dapat diobservasi lagi dan tidak dapat diingat lagi".

Adapun kegunaan metode dokumentasi menurut Arikunto (1998:150) memiliki kedudukan penting yaitu Untuk mencari bukti-bukti dari landasan hukum dan peraturan atau ketentuan secara cermat.

4. Metode analisis data

Metode analisis data merupakan suatu cara menganalisis data secara lebih runtut agar diperoleh data yang valid. Analisis data yang dimaksud adalah sebagai rangkaian berfikir untuk menelaah suatu hal secara mendalam dan sistematis mengenai ciri-ciri dan fenomena-fenomena serta keterkaitannya dengan kondisi tertentu. Analisis data merupakan langkah terakhir bagi seorang peneliti untuk memecahkan masalah dan menguji kembali tingkat kebenaran hipotesis dengan menganalisis dan menginterpretasikan data. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Effendi (1989:163) bahwa, "Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dicapai dan diinterpretasikan. Dalam hal ini sering digunakan statistik". Metode analisis data terbagi dalam 2 metode yang sering dipakai oleh peneliti yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Kedua metode ini dapat digunakan sebagai alat memecahkan masalah dan pengujian hipotesis. Menurut Marzuki (1982:328) bahwa, "Analisis kualitatif atau non statistik adalah suatu analisis yang dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel atau grafik-grafik atau angka-angka yang kemudian dilakukan uraian atau penafsiran". Sedangkan Husein (1998:95) menuturkan penjelasan mengenai riset deskriptif sebagai berikut:

Riset kualitatif menggunakan data yang bukan skala rasio tapi dalam bentuk yang lebih rendah yaitu skala nominal, ordinal atau interval yang semuanya dapat dikategorikan sehingga jelas apa yang akan didata dan apa yang akan diperbandingkan untuk menggabungkan permasalahan yang dirumuskan dalam riset. Karena inilah bagian terpenting dari riset jenis ini. Selanjutnya ditambahkan bahwa dalam pengkategorian itu, kita harus berpegang pada prinsip menyesuaikan kategori dengan data dan bukan sebaliknya data disesuaikan dengan kategori.

Metode kualitatif hanya merupakan suatu uraian dan penafsiran, maka untuk menyakinkan kebenaran penalaran tersebut perlu didukung dengan menggunakan teknik uji kuantitatif atau uji statistik. Pengujian kuantitatif menurut

Koentjoroningrat (1981:328) adalah, "Analisis kuantitatif atau disebut analisis statistik yaitu analisis untuk jenis data yang mudah diklasifikasi kedalam kategori (dan oleh karenanya berstruktur) dan jumlah data yang terkumpul besar". Dalam kategori ini metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini berskala nominal, maksudnya tingkat pengukuran yang tidak ada jarak maupun urutan antara kategori dalam ukuran itu. Dasar pengklasifikasian merupakan kategori yang tidak tumpang tindih dan tuntas. "Angka" yang ditunjuk untuk suatu kategori tidak mencerminkan bagaimana kedudukan kategori tersebut terhadap kategori yang lainnya, tetapi hanyalah sekedar label atau kode.

Dengan melihat skala nominal tersebut berarti alat uji statistik yang bisa digunakan dalam penelitian ini antara lain chi kuadrat (X^2). Menurut Siegel (1994:133) rumus X^2 sebagai berikut:

$$x^2 = \frac{N \left(\left| AD - BC \right| - \frac{N}{2} \right)^2}{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}$$

Keterangan:

X^2	= Chi kuadrat
A,B,C,D	= Frekuensi yang diamati
$(A+B)(C+D)$	= Jumlah frekuensi kerja dalam baris
$(A+C)(B+D)$	= Jumlah frekuensi kerja dalam kolom
N	= Jumlah sampel

Selanjutnya dalam kasus 2x2, jika frekuensi-frekuensi ada dalam suatu tabel kontingensi 2x2 maka keputusan memakai X^2 atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Bila $N > 40$, gunakan X^2 dengan koreksi kontinuitas, yakni menggunakan rumus (6.4)
2. Kalau N ada diantara 20-40, tes X^2 rumus (6.4) boleh dipakai jika semua frekuensi diharapkan adalah Satau lebih. Jika frekuensi diharapkan yang terkecil kurang dari 5, pakailah tes Fisher.
3. Bila $N < 20$, gunakan tes Fisher untuk kasus apapun

BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Pengantar

Deskripsi daerah penelitian merupakan salah satu data yang dapat digunakan sebagai bahan pembantu dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan dalam pemecahan suatu masalah dalam penelitian atau dapat memperkuat analisa data primer. Dengan deskripsi lokasi penelitian kita akan memperoleh gambaran yang jelas terhadap segala aspek yang terdapat dalam lokasi penelitian. Sehingga akan mempermudah kita menganalisis data yang kita peroleh dalam membentuk penelitian yang akurat dan pada akhirnya akan memberikan pemahaman yang luas terhadap obyek penelitian kita.

2.2 Letak Geografis

Desa Bulang merupakan bagian dari Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Jarak desa Bulang dengan pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 2 km dan dari ibukota kabupaten berjarak sekitar 7 km. Adapun batas-batas desa Bulang adalah sebagai berikut:

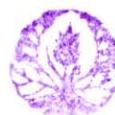
1. Sebelah Selatan : Pegalangan Kidul
2. Sebelah Utara : Pesisir
3. Sebelah Timur : Brumbungan Lor
4. Sebelah Barat : Randupitu dan Pikatan

Luas wilayah desa Bulang secara keseluruhan adalah : 260.750 Ha yang terbagi dalam 5 Dusun dengan pembagian wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga(RW) dan luas daerah masing- masing Dusun sebagai berikut:

Tabel 3. Tentang Pembagian Luas Wilayah Desa Bulang

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Luas Daerah
1	Langai	4 RT	2 RW	88.381 Ha
2	Rondo Kuning	4 RT	2 RW	37.510 Ha
3	Nangger	4 RT	2 RW	55.045 Ha
4	Togur	5 RT	2 RW	30.937 Ha
5	Klompang	6 RT	2 RW	48.877 Ha

Sumber: Data Sekunder Monografi Desa Bulang Tahun 2001



Adapun luas wilayah Desa Bulang yang secara keseluruhan adalah :260.750 Ha tersebut terbagi menjadi dua struktur wilayah (tanah) yaitu:

1. Tanah Sawah
 - a. Irigasi Tehnis : 196.857 Ha
2. Tanah Kering
 - a. Pekarangan : 39.705 Ha
 - b. Tambak : 15.010 Ha

Sedangkan dari luas total wilayah desa Bulang terdapat tanah yang menjadi kas desa yang terbagi menjadi kas desa atau yang disebut tanah kas desa yang terbagi menjadi 2 jenis tanah kas desa yaitu:

1. Tanah Kering : 0,387 Ha
2. Tanah Sawah : 0,532 Ha

2.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Bulang secara keseluruhan adalah 2.390 jiwa yang terbagi menjadi 1124 jiwa laki-laki dan 1276 jiwa wanita. Jumlah tersebut terbagi dalam 452 Kepala Keluarga (KK).

2.3.1 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 4. Tentang Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Taman Kanak-kanak	72	7
2	SD/Sederajat	581	53
3	SMP/SLTP	245	22
4	SMA/SLTA	136	12
5	Akademi/D1-D2	25	2
6	Sarjana/ S1-S2	40	4
	Jumlah	1.099	100%

Sumber: Data Sekunder Monografi Desa Bulang Tahun 2001

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 2390 jiwa penduduk desa Bulang terdapat 1.099 jiwa yang mengenyam pendidikan sekolah. Dan dari 1.099 tersebut, yang memiliki jumlah terbanyak adalah berpendidikan SD yakni 53% dan yang paling sedikit adalah yang berpendidikan Akademi D1-D2 yaitu sekitar 4%.

2.3.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Kelompok Tenaga Kerja

Tabel 5. Tentang Komposisi Penduduk Menurut umur dan Kelompok Tenaga Kerja

NO	Umur	Jumlah	Prosentase
1	10-14	197	8
2	15-19	315	12
3	20-26	303	12
4	27-40	568	23
5	41-56	698	27
6	57-Keatas	461	18
Jumlah		2842	100

Sumber: data Monografi Desa Bulang Tahun 2001

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja usia sekolah sekitar 20%. Sedangkan tenaga kerja produktif 74% dan tenaga kerja tidak produktif 18% karena berusia lanjut.

2.3.3 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian Desa Bulang

Tabel 6. Tentang Komposisi Penduduk menurut Mata Pencapaian

NO	Mata Pencapaian	Jumlah	Prosentase
1	Peg. Negeri Sipil	62	3
2	Karyawan Swasta	13	1
3	Wiraswasta	345	29
4	Petani	365	30
5	Buruh Tani	401	35
6	Tukang	41	2
7	Pensiunan	27	1
Jumlah		1.200	100

Sumber: Data Sekunder Monografi Desa Bulang Tahun 2001

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan pekerjaan warga desa Bulang yang terbesar adalah buruh tani dengan prosentase 35 % dan yang kedua adalah petani 30% dari tabel seluruh pekerjaan penduduk.

2.4 Sarana dan Prasarana Di Bidang Pembangunan

Sarana dan prasarana dibidang pembangunan yang telah dimiliki desa Bulang Kecamatan Gending antara lain sebagai berikut:

2.4.1 Bidang Agama

Sarana Peribadatan

- a. Jumlah Masjid : 3 Buah
- b. Jumlah Musholla : 11 Buah

2.4.2 Bidang Pendidikan

a. Pendidikan Umum

1. Jumlah Gedung Sekolah TK : 1 Buah
2. Jumlah Sekolah Dasar : 2 Buah

b. Pendidikan Khusus

1. Taman Pendidikan Agama : 2 Buah

2.4.3 Prasarana Perhubungan

Prasarana Perhubungan didesa Bulang adalah sebagai berikut:

- a. Jalan desa : 10 km
- b. Jalan aspal : 7 km
- c. Jembatan : 2 buah

2.4.4 Sarana Komunukasi

- a. Pemilikan Pesawat TV : 381
- b. Pemilikan Pesawat Radio : 412
- c. Pemilikan Radio Transistor : 17
- d. Pemilikan Pesawat Telpon : 25

2.4.5 Transportasi

- a. Sepeda : 811
- b. Sepeda motor : 369
- c. Mobil pribadi : 19
- d. Truk : 7

2.4.6 Pengairan

- a. Pembagi air : 3 buah
- b. Pompa air : 4 buah
- c. Saluran irigasi : 3400m

2.4.7 Sarana Pemerintah Desa

- a. Balai Desa : 1 Buah
- b. Kantor Desa : 1 Buah
- c. Tanah Bengkok Desa
 - 1 Sawah : 25.387 Ha
 - 2 Tambak : 39.705 Ha

2.4.8 Sarana Perekonomian

- a. Toko : 17 Buah
- b. Warung/Kios : 11 Buah
- c. Koperasi Unit Desa : 1 Buah
- d. Badan Kredit Desa : 1 Buah

2.4.9. Sarana Olahraga

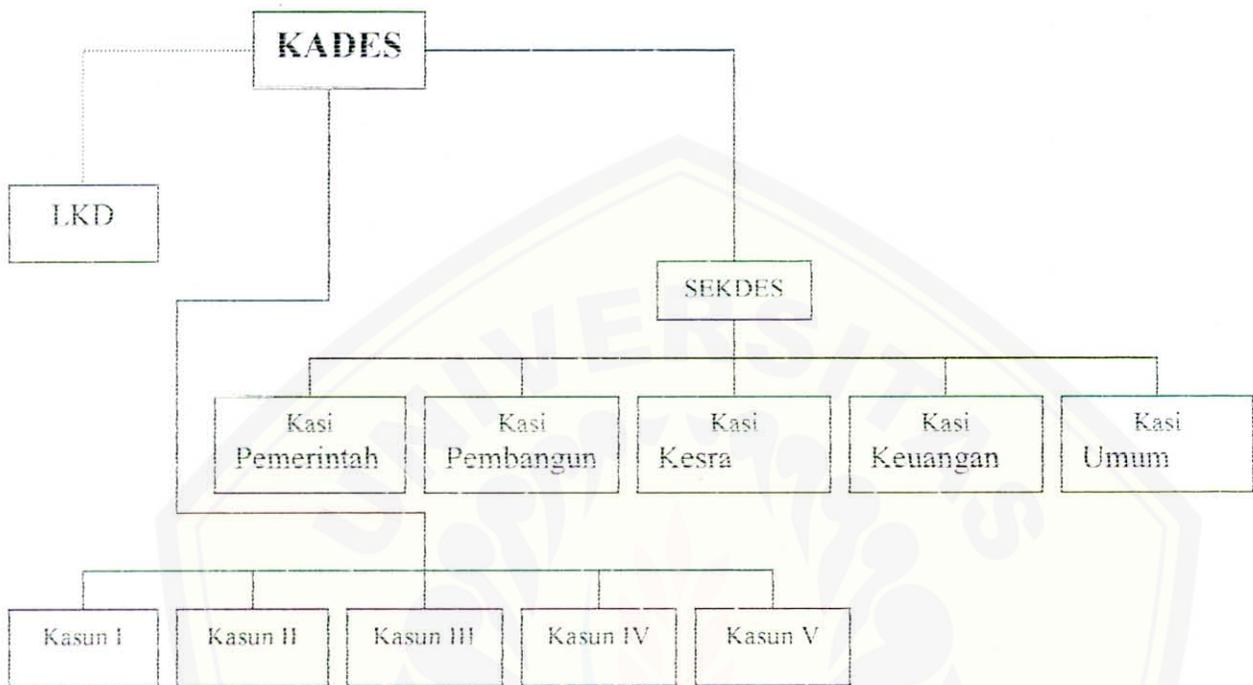
- a. Lapangan Sepak Bola : 1 Buah
- b. Lapangan Bola Volly: 1 Buah
- c. Lapangan Bulu Tangkis : 1 Buah

2.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pada dasarnya organisasi merupakan suatu kerangka hubungan antar suatu organisasi yang didalamnya terdapat jabatan, tugas, wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam satuan yang utuh. Agar organisasi dapat berjalan lancar maka dibutuhkan pola anutan hubungan antar pengurus serta membantu dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sehingga efisiensi dan efektifitas dapat tercapai serta dapat meminimalkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) dalam pelaksanaan tugas. Untuk itulah maka suatu organisasi harus melaksanakan proses pengorganisasian yaitu dengan jalan menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki.

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan- hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1999



Sumber: data sekunder rangkuman kebijaksanaan penguatan kelembagaan pemerintah desa

Berdasarkan ketentuan pasal 94 Undang-Undang No 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa:

a. Pemerintah desa terdiri atas:

1. Kepala Desa
2. Badan Perwakilan Desa

b. Pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari:

1. Sekretaris desa
2. Kepala Dusun
3. Kepala Urusan

Dari konstruksi yang demikian itu maka susunan organisasi pemerintah desa meliputi :

a. Unsur pimpinan yaitu:

1. Kepala desa
2. Lembaga Musyawarah desa

b. Unsur Pelayanan yaitu

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Urusan

c. Unsur pelayanan tugas wilayah yaitu kepala-kepala dusun

Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang tata pembagian dan hubungannya bagi unit-unit organisasi pemerintah desa, maka berikut ini akan diuraikan tentang kedudukan, tugas dan fungsi dari unit-unit kerja dalam struktur organisasi pemerintah desa sebagai berikut:

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah dan pelaksana pemerintahan atas desa
- b. Sesuai dengan kedudukan dimaksud, kepala desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksana pemerintah dan pembangunan desa.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan tugas dari pemerintah daerah, melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

- a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan dibidang ketatausahaan dan pimpinan sekretaris desa
- b. Sesuai dengan kedudukan tersebut, sekretaris desa, mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pelaksanaan administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan serta memberikan pelayanan dibidang ketatausahaan kepada kepala desa
- c. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, sekretaris desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum dan melaksanakan tugas kepala desa dalam hal ini kepala desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

- a. Kepala Seksi Berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa untuk memberikan pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- b. Sesuai dengan kedudukannya, maka kepala Seksi mempunyai tugas pokok Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kepala seksi mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data atau informasi yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

Adapun seksi-seksi yang terdapat dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Bulang terbagi menjadi:

1. Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi dan tugas:
 - a. Melaksanakan pemerintahan desa, pelayanan dan fasilitas pemilu
 - b. Melaksanakan pembinaan ketertiban dan ketentraman, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
 - c. Penyelenggaraan pemerintahan
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan pertanahan
 - e. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil

- f. Pendataan potensi desa
 - g. Fasilitator kegiatan pelaksanaan pemilu
 - h. Perencanaan sarana fisik perangkat desa
 - i. Penyusunan program pembinaan ketentraman dan ketertiban desa
 - j. Penertiban dalam rangka penegakan peraturan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
 - k. Pengamanan desa dalam rangka mencegah gangguan ketertiban, bencana alam, dan kegiatan lainnya
 - l. Penyusunan program dan pembinaan kesatuan bangsa dan ideologi negara serta perlindungan masyarakat
 - m. Pemberian pertimbangan dan rekomendasi kegiatan survey, kkn, dan lainnya
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
2. Kepala seksi pembangunan memiliki tugas dan fungsi:
- a. Melaksanakan urusan pembangunan desa
 - b. Melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan potensi pembangunan desa
 - c. Menyelenggarakan pembangunan
 - d. Melaksanakan pendataan terhadap potensi pembangunan desa
 - e. Penyusunan program pembangunan desa
 - f. Mengendalikan kelompok kerja yang terbentuk dalam kegiatan pembangunan
 - g. Menyusun laporan secara berkala terhadap kegiatan pembangunan desa
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
3. Kepala seksi kesejahteraan rakyat memiliki tugas dan fungsi:
- a. Melaksanakan urusan terhadap kesejahteraan rakyat desa
 - b. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat desa
 - c. Menyusun rencana program kesejahteraan rakyat desa
 - d. Melaksanakan perkembangan dan mencatat kegiatan kesra

- e. Mengendalikan unsur-unsur kerja dalam pelaksanaan program kesra
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
4. Kepala seksi keuangan memiliki tugas dan fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan keuangan desa
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan desa
 - c. Menyelenggarakan pembukuan
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan desa
 - e. Mengadakan catatan swadaya gotong-royong masyarakat desa
 - f. Mengadakan pencatatan terhadap penerimaan keuangan desa berdasarkan pajak dan sumber lainnya
5. Kepala seksi umum memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan umum yang ada di desa
 - b. Melaksanakan pelayanan umum terhadap masyarakat desa
 - c. Pelaksanaan pelayanan administrasi terhadap masyarakat desa

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya

- a. Sesuai dengan kedudukannya, kepala dusun mempunyai tugas pokok untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa dalam kepemimpinan kepala desa di wilayah kerjanya
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka kepala dusun mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya melaksanakan keputusan desa dan melaksanakan kebijaksanaan kepala desa

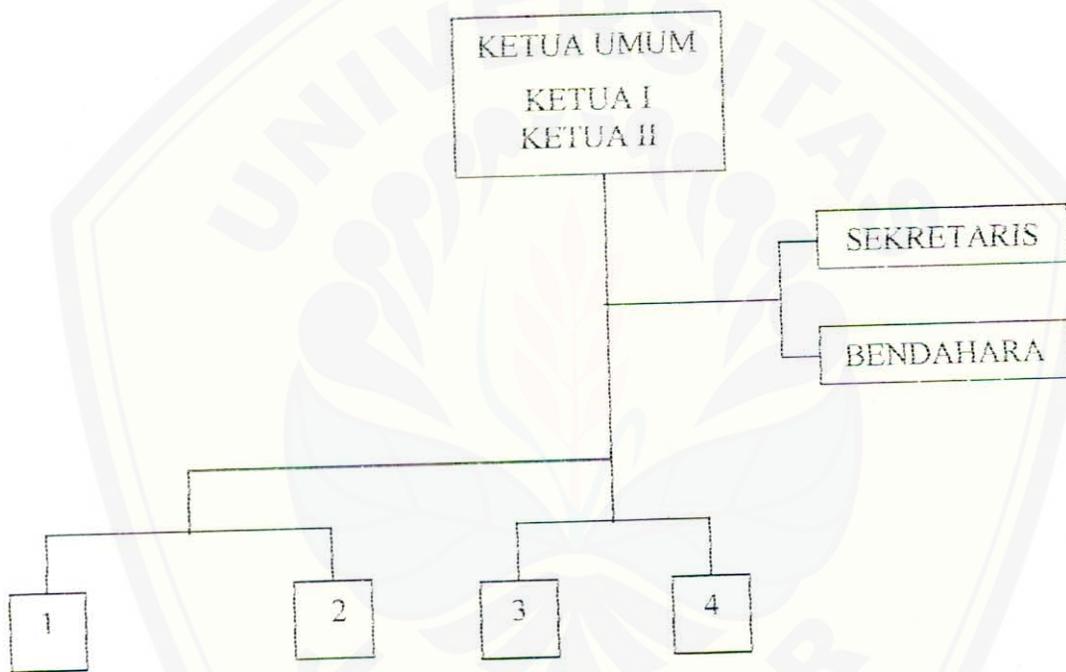
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Ketahanan Desa

- a. Lembaga Ketahanan Desa berkedudukan sebagai wadah penyelenggaraan ketahanan masyarakat desa
- b. Dalam kedudukannya tersebut, lembaga ketahanan desa bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

- c. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, lembaga ketahanan desa berfungsi memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan desa dan membina hubungan yang baik dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

2.6 Badan Perwakilan Desa

GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI BPD MENURUT UU No. 22 TAHUN 1999



Keterangan:

1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Pembangunan
3. Seksi perekonomian
4. Seksi kemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 104, Dibentuk suatu lembaga desa yang disebut Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat desa serta melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan pada pasal 105 dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan
2. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota
3. BPD bersama kepala desa menetapkan peraturan desa
4. Pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa

Kepengurusan BPD terdiri dari pemuka- pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga yang ada di desa. Adapun pengurus BPD terdiri dari:

- a. Ketua Umum
- b. Ketua I
- c. Ketua II
- d. Sekretaris
- e. Seksi- Seksi

Keterangan :

1. Ketua Umum Dijabat oleh Ust. Mahdur

Ketua Umum mempunyai tugas sebagai pemimpin atau penanggung jawab BPD. Untuk melaksanakan tugasnya Ketua Umum Mempunyai fungsi antara lain:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BPD
- b. Secara khusus melakukan koordinasi terhadap seksi pembangunan, seksi kemasyarakatan, seksi perekonomian dan kemasyarakatan
- c. Membina Kader pembangunan desa sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis

2. Ketua I dijabat oleh Adi Santoso

Ketua I Bertugas membantu ketua umum dalam memimpin dan mengendalikan BPD. Untuk melaksanakan tugasnya ketua I mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi Terhadap seksi pembangunan, seksi perekonomian dan seksi kemasyarakatan
- b. Melaksanakan tugas tugas tertentu yang diberikan ketua umum

- c. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua umum jika ketua umum berhalangan
3. Ketua II adalah juga ketua yang berfungsi membantu tugas ketua umum dalam memimpin dan mengendalikan BPD. Adapun fungsi dari ketua II:
- a. Mengelola dan memimpin seksi –seksi yang ada
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan ketua umum dan atau ketua I jika ketua umum berhalangan dan atau ketua I berhalangan
 - c. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua umum
4. Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan. Sekretaris memiliki fungsi
- a. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pendapat dan penyusunan laporan
 - b. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan ketua umum
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua umum, ketua I, ketua II, jika mereka berhalangan.

5. Seksi-seksi

Setiap seksi diketuai oleh ketua seksi. Ketua seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksi masing-masing. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut ketua seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidangnya masing-masing
- b. menyelenggarakan kegiatan pembanguna sesuai dengan rencana
- c. melakukan koordinasi terhadap seksi lain untuk mewujudkan keserasian pelaksanaan pembangunan
- d. mengendalikan kelompok kerja yang terbentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan
- e. mengadakan pengawasan terhadap kegiatan masing-masing
- f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi-seksinya
- g. Menyusun laporan secara berkala

- h. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan
- i. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua umum
- j. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua umum

Adapun seksi-seksi yang terdapat dalam kepengurusan Badan Perwakilan Desa (BPD) terbagi menjadi:

1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Pembangunan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Kemasyarakatan

Adapun fungsi dari masing-masing seksi tersebut yaitu

1. Seksi Pemerintahan memiliki fungsi yaitu:
 - a. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan seksi lain untuk mewujudkan keserasian pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
 - c. Mewakili masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan masyarakat
 - d. Mengadakan laporan secara berkala terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Seksi Pembangunan memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan
 - b. Menyusun program pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa
 - c. Melaksanakan fungsi perwakilan masyarakat terhadap perkembangan penyelenggaraan pembangunan desa
 - d. Menyusun laporan secara berkala terhadap hasil pengawasan penyelenggaraan pembangunan desa
 - e. Mengadakan evaluasi terhadap hasil pengawasan penyelenggaraan pembangunan

3. Seksi perekonomian memiliki fungsi yaitu
 - a. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perekonomian desa
 - b. Menyusun program perekonomian desa sesuai dengan aspirasi masyarakat
 - c. Menyusun laporan secara berkala terhadap pengawasan penyelenggaraan perekonomian desa
 - d. Mengadakan evaluasi terhadap hasil pengawasan penyelenggaraan perekonomian
4. Seksi kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kemasyarakatan
 - b. Menyusun kerangka program kemasyarakatan sesuai dengan aspirasi masyarakat
 - c. Menyusun laporan secara berkala terhadap pengawasan penyelenggaraan program kemasyarakatan
 - d. Mengadakan evaluasi terhadap hasil pengawasan penyelenggaraan program kemasyarakatan

Tabel 7 Susunan Pengurus BPD Periode 2000-2001 di Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo

NO	Nama	Jabatan	pendidikan	Pekerjaan
1	Mahdur G	Ketua Umum	SLTA	Kasek MTS
2	Adi Santoso	Ketua I	M-I	Tani
3	Ahmad	Ketua II	M-I	Tani
4	Baidhowi	Seksi Pembangunan	D-3	PNS
5	Sudirman	Seksi Pembangunan	SLTA	Wiraswasta
6	Abdul Aji	Seksi Kemasyarakatan	SLTA	Wiraswasta
7	Abdur Rohman	Seksi Kemasyarakatan	SLTA	Tani
8	Muhtar	Seksi pembangunan	M-I	Tani
9	Aziz Misto	Perekonomian	M-I	Tani
10	H. Ilyas	Seksi pembangunan	M-I	PNS
11	Hofifi, Spd	Sekretaris	S-I	PNS
12	Drs. Jasuli Ai Badri	Sekretaris	S-I	PNS
13	M Tauhid	Anggota	D-2	PNS
14	M Taufik	Anggota	SLTA	Tani
15	Bambang Tri	Anggota	SLTA	Tani
16	Rahman	Anggota	SLTA	Tani
17	Ribut Effendi	Anggota	SLTA	Tani
18	Saiful Anwar	Anggota	SLTA	Tani
19	Ahmad Santoso	Anggota	SLTA	Wiraswasta
20	Rahmad	Anggota	SLTA	Wraswasta

Sumber: Data Sekunder Buku Kerja BPD Tahun 2001

Tabel 8 Nama-Nama Perangkat Desa

NO	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1	M. Ilyas SH	Kepala Desa	S-I	Wiraswasta
2	Sudjono	Sekretaris Desa	SLTA	Tani
3	Adji Winoko	Kasi Pemerintahan	SLTA	Tani
4	Muhlas	Kasi Kesra	SLTP	Tani
5	Sutarji	Kasi Pembangunan	SLTA	Tani
6	M. Hasar	Kaur Keuangan	SLTA	Tani
7	Tsanawiyah	Kaur Umum	SD	Tani
8	Tjondro	Kasun Langai	SD	Wiraswasta
9	Tjokro sari	Kasun Rondo Kuning	SD	Wiraswasta
10	Akmo	Kasun Nangger	SLTP	Tani
11	Muhlis	Kasun Togur	SLTA	Tani
12	A. Rofiq	Kasun Klompang	SLTA	Wiraswasta

Sumber: Data Sekunder Buku Kerja Desa Bulang Tahun 2001

Tabel 9. Nama-Nama Tokoh Masyarakat

NO	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Sri rohmani, Spd, Mpd	38 Tahun	S-2	PNS
2	Tauhid, Amd	45 Tahun	D-3	PNS
3	Ir.ridwan	33 Tahun	S-I	Wiraswasta
4	Ahmad Baidhowi	47 Tahun	SLTA	Wiraswasta
5	Drs. M. Taufik	36 Tahun	S-I	PNS

Sumber: Data Sekunder Desa Bulang Tahun 2001

Tabel 10. Nama-Nama Tokoh Agama

NO	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	K. Adi Santoso	45 Tahun	SLTA	Tani
2	Akhmad Baidhowi	45 Tahun	SLTA	Wiraswasta
3	M. Suroso	47 Tahun	SLTP	Tani
4	M. Hasan Ar- Robi	35 Tahun	Amd	Wiraswasta
5	Imaddudin, Spd	30 Tahun	S-1	PNS
6	M. Kun Wasis, S. Sos	38 Tahun	S-1	Wartawan
7	Rafiudin Fatoni, S.Sos	36 Tahun	S-1	PNS
8	Fahrudin, S.Sos	40 Tahun	S-1	PNS

Sumber: Data Sekunder Desa Bulang Tahun 2001

Tabel 11. Jenis-Jenis Pos Penerimaan Biaya Pembangunan Periode 2001-2002
Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo

No	Pos Penerimaan	Jumlah
1	Swadaya masyarakat desa Bulang	5.000.000
2	Subsidi dari pemerintah	104.957.500
3	Tanah kas desa	86.500.000
4	Kekayaan desa lainnya	200.000
5	Pungutan	25.000
6	Pemberian surat	25.000
7	Usaha burung walet	50.000
8	Lain-lain (mebel antik)	25.000
9	Potomg sapi	25.000
9	Selep	100.000
10	Sumbangan dan bantuan dana pembangunan desa dan kelurahan (DPDK)	12.000.000
11	Operasional BPD	1.000.000
Jumlah Total		205.907.500

Sumber: Data sekunder desa Bulang Tahun 2001

Tabel 9. Pengeluaran rutin pembangunan Periode 2001-2002 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo

No	Pos pengeluaran rutin	Jumlah
1	Penghasilan rutin kepala desa	24.175.000
2	Sekretaris desa	12.580.000
3	Kepala seksi (3 orang)	21.030.000
4	Kepala dusun (5 orang)	19.047.500
5	Kepala urusan (3 orang)	7.867.000
6	Pos belanja BPD	1.000.000
7	Uang sidang BPD	2.680.000
8	Alat tulis BPD	250.000
9	Alat tulis Kantor LKD	250.000
10	Alat tulis desa	525.000
11	Peralatan kantor	1.300.000
12	Administrasi dana pembangunan desa kelurahan (DPDK)	240.400
13	Pengecatan kantor	250.000
14	Pemeliharaan kantor desa	2.000.000
15	Perjalanan dinas perangkat desa	200.000
16	Perjalanan dinas BPD	200.000
17	Rapat-rapat/kegiatan desa	1.200.000
18	Biaya operasional DPDK	275.000
19	Penentuan proyek	100.000

Sumber: Data sekunder Desa Bulang Tahun 2001

BAB III**PENYAJIAN DATA VARIABEL PENELITIAN****3.1 Pengantar**

Sebelum melangkah pada tahap penganalisisan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis mengadakan pengkajian tentang indikator- indikator dan variabel-variabel penelitian, data primer dari sejumlah pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan indikator-indikator yang ada.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ada dua yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Adapun variabelnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pengaruh (X) yaitu perilaku ketua umum BPD yang terdiri dari indikator-indikator:
 - a. Perilaku mengarahkan/tugas
 - b. Perilaku mendukung/hubungan
2. Variabel terpengaruh (Y) yaitu partisipasi anggota BPD dalam pembangunan desa yang ditandai dari indikator:
 - a. Proses pengambilan keputusan

3.2. Penyajian data variabel pengaruh (X)

Variabel pengaruh dalam penelitian ini adalah Perilaku pemimpin yang diwujudkan dalam sikap serta tingkah laku seorang pemimpin atau ketua umum BPD dalam memberikan himbangan, dorongan, dukungan dan arahan terhadap masyarakat sehingga merasa diperhatikan dan dengan sukarela menjalankan aktivitasnya yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana yang penulis nyatakan dimuka dari variabel perilaku pemimpin ini penulis mengambil indikator-indikator sebagai berikut:

1. Perilaku mengarahkan/tugas (X1)
2. Perilaku hubungan/dukungan (X2)

3.2.1 Perilaku mengarahkan /tugas (X1)

Dengan perilaku mengarahkan disini maksudnya adalah pengarahan ketua umum BPD sebagai pemimpin dalam bentuk komunikasi satu arah (one way communication) sehingga dapat dianalisis bahwa ketua umum BPD memberikan satu informasi yang berlangsung

secara sepihak kepada masyarakat. Dengan perilaku tugas ketua umum memberikan penjelasan tentang program-program pembangunan agar dapat terlaksana dengan baik. Untuk mengetahui sejauh mana perilaku tugas dari pemimpin BPD dapat mempengaruhi partisipasi anggota BPD berikut akan dijelaskan item-item dari perilaku tugas ketua umum BPD

Adapun item-item yang akan diukur dari perilaku tugas ini sebagai berikut:

- a. Pemimpin menetapkan jenis tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota
- b. Pemimpin memberitahukan kepada anggota tentang kapan dan dimana melaksanakan tugas
- c. Pemimpin memberikan ketetapan waktu penyelesaian suatu tugas pekerjaan pada anggotanya.
- d. Pemimpin memberitahukan tentang tata cara melaksanakan tugas melaksanakan tugas pekerjaan kepada anggotanya
- e. Pemimpin memberikan pengawasan atau tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggotanya

3.2.2 Perilaku Mendukung/ hubungan

Agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik, maka seorang pemimpin/ketua umum BPD harus memberikan support pada masyarakat dengan segala aktivitasnya. dalam perilaku hubungan ini pendekatannya lebih bersifat konsultatif, karena dalam perilaku hubungan ini pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah dengan masyarakat sehingga terjalin suatu interaksi yang sehat dalam proses pengambilan keputusan untuk rencana pembangunan desa.

Perilaku mendukung adalah sejauh mana pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudalikar interaksi dan melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengukur indikator perilaku mendukung/hubungan ini dapat digunakan item-item sebagai berikut:

- a. Pemimpin mendengarkan anggotanya dengan jalan mendengarkan ide-ide mereka demi kebaikan bersama
- b. Pemimpin menyediakan dukungan dan dorongan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa

- c. Pemimpin membina hubungan yang harmonis dengan jalan berinteraksi dengan anggotanya
- d. Pemimpin melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan

Tabel 13 Data Total Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengaruh Indikator Perilaku Mengarahkan/Tugas (X1)

NO	X1					Skor
	1	2	3	4	5	
1	2	2	1	1	1	7
2	2	1	2	2	1	7
3	2	1	2	2	2	9
4	2	1	2	1	1	7
5	2	1	2	1	2	8
6	2	1	2	1	2	8
7	2	2	2	1	1	8
8	2	1	1	2	1	7
9	2	2	1	2	1	8
10	2	2	1	1	1	7
11	2	2	2	2	1	9
12	2	1	1	2	1	7
13	2	2	1	2	1	8
14	2	1	2	2	2	9
15	2	2	1	1	1	7
16	2	2	2	2	1	9
17	2	1	2	2	2	9
18	2	1	2	1	2	8
19	2	1	2	1	2	8
20	2	2	2	1	1	8

Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner) Diolah Tahun 2002

Tabel 14 Data Total Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengaruh Indikator Perilaku Mendukung/Hubungan (X2)

NO	X2				Skor
	1	2	3	4	
1	2	2	2	2	8
2	2	1	1	2	6
3	2	2	1	2	7
4	2	1	1	2	6
5	2	2	2	2	8
6	2	1	2	2	7
7	2	1	2	2	7
8	2	1	2	1	6
9	2	2	1	2	7
10	2	2	2	2	8
11	2	2	1	2	7
12	2	2	2	2	8
13	2	2	2	2	8
14	2	2	1	2	7
15	2	1	2	1	6
16	2	2	2	2	8
17	2	2	2	2	8
18	2	1	2	2	7
19	2	2	2	1	7
20	2	2	1	2	7

Sumber: Data primer (Hasil Kuesioner) Diolah Tahun 2002

Tabel. 15 Data Skor Jawaban Terhadap Variabel Pengaruh (X)

NO	X1					X2				Total Skor	Kriteria
	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	15	Tinggi
2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	13	Rendah
3	2	1	2	2	2	2	2	1	2	16	Tinggi
4	2	1	2	1	1	2	1	1	2	13	Rendah
5	2	1	2	1	2	2	2	2	2	16	Tinggi
6	2	1	2	1	2	2	1	2	2	15	Tinggi
7	2	2	2	1	1	2	1	2	2	15	Tinggi
8	2	1	1	2	1	2	1	2	1	13	Rendah
9	2	2	1	2	1	2	2	1	2	15	Tinggi
10	2	2	1	1	1	2	2	2	2	15	Tinggi
11	2	2	2	2	1	2	2	1	2	16	Tinggi
12	2	1	1	2	2	2	2	2	2	16	Tinggi
13	2	2	1	2	1	2	2	2	2	16	Tinggi
14	2	1	2	2	2	2	2	1	2	16	Tinggi
15	2	2	1	1	1	2	1	2	1	13	Rendah
16	2	2	2	2	1	2	2	2	2	17	Tinggi
17	2	1	2	2	2	2	2	2	2	17	Tinggi
18	2	1	2	1	2	2	1	2	2	15	Tinggi
19	2	1	2	1	2	2	2	2	1	15	Tinggi
20	2	2	2	1	1	2	2	1	2	15	Tinggi

Sumber: Data Primer (Hasil Quesioner) Diolah Tahun 2002

Berdasarkan total skor jawaban responden terhadap perilaku pemimpin seperti yang tercantum dalam tabel maka data skor jawaban responden tersebut dapat dikelompokkan dalam tabel frekuensi sebagai berikut:

Kriteria	Frekuensi	Prosentase
Rendah	4	20
Tinggi	16	80
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner) Diolah Tahun 2002

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan 80 % menjawab perilaku pemimpin tinggi Dan 20 % menjawab rendah.

3.3 Penyajian data variabel terpengaruh (Y)

Variabel terpengaruh dalam penelitian ini adalah partisipasi anggota BPD dalam pembangunan desa. Sementara itu dalam variabel terpengaruh ini dapat diukur dalam indikator keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Adapun item-item yang akan diukur dari indikator proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a Kesediaan anggota BPD untuk menyumbangkan ide, gagasan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b Kesediaan anggota BPD untuk menyumbangkan informasi dan pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c Kesediaan anggota BPD untuk me
- d menyusun rencana dan ikut dalam pembuatan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 16. Data total skor jawaban responden terhadap variabel terpengaruh (Y)

No	1	2	3	Total Skor	Kriteria
1	2	1	1	4	Rendah
2	2	1	2	5	Tinggi
3	2	2	2	6	Tinggi
4	2	2	1	5	Tinggi
5	2	1	1	4	Rendah
6	2	2	2	6	Tinggi
7	2	1	2	5	Tinggi
8	2	2	2	6	Tinggi
9	1	1	2	4	Rendah
10	2	2	1	5	Tinggi
11	2	1	1	4	Rendah
12	2	1	2	5	Tinggi
13	2	2	2	6	Tinggi
14	2	2	2	6	Tinggi
15	1	1	1	4	Rendah
16	2	1	1	5	Tinggi
17	2	1	1	5	Tinggi
18	2	2	2	6	Tinggi
19	1	2	2	5	Tinggi
20	2	2	2	6	Tinggi

Sumber: Data primer (Hasil questioner) Diolah Tahun 2002

Berdasarkan total skor jawaban responden terhadap partisipasi anggota BPD seperti yang tercantum dalam tabel maka data skor jawaban responden tersebut dapat dikelompokkan dalam tabel frekuensi sebagai berikut:

Tabel 17. Frekuensi partisipasi anggota BPD

Kriteria	Frekwensi	Prosentase
Rendah	5	25
Tinggi	15	75
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner)

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa 75 % menjawab partisipasi anggota BPD tinggi dan 25 % rendah.

Tabel 18. Data kriteria jawaban responden terhadap variabel (X) dan (Y)

No	Variabel (X)		Variabel (Y)	
	Skor	Kriteria	Skor	Kriteria
1	15	Rendah	4	Rendah
2	13	Rendah	5	Tinggi
3	16	Tinggi	6	Tinggi
4	13	Rendah	5	Tinggi
5	16	Tinggi	4	Rendah
6	15	Tinggi	6	Tinggi
7	15	Tinggi	5	Tinggi
8	13	Rendah	6	Tinggi
9	15	Tinggi	4	Rendah
10	15	Tinggi	5	Tinggi
11	16	Tinggi	4	Rendah
12	16	Tinggi	5	Tinggi
13	16	Tinggi	6	Tinggi
14	16	Tinggi	6	Tinggi
15	13	Rendah	4	Rendah
16	17	Tinggi	5	Tinggi
17	17	Tinggi	5	Tinggi
18	17	Tinggi	6	Tinggi
19	15	Tinggi	5	Tinggi
20	15	Tinggi	6	Tinggi

Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner) Diolah Tahun 2002

Berdasarkan data kriteria jawaban responden terhadap variabel perilaku pemimpin dapat dikatakan tinggi yaitu sekitar 80 % sedangkan data dari jawaban responden terhadap partisipasi anggota BPD dapat dikatakan tinggi yaitu 75 %.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah berhasil penulis jelaskan mulai dari latar belakang masalah sampai langkah terakhir yaitu analisis data maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku ketua umum BPD dapat dilihat dari perhitungan X^2 bahwa perilaku ketua umum BPD yang sering melaksanakan fungsi tugas dan hubungan sesuai dengan kondisi dapat meningkatkan partisipasi anggota BPD dalam pembangunan di Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo. Hal ini bisa dilihat dari X^2 hitung= 5,6 dan X^2 tabel= 3,841. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel, sehingga terbukti ada pengaruh.
2. Berdasarkan analisis data deskriptif yang penulis gunakan, untuk membuktikan hipotesis mengenai perilaku pemimpin dalam meningkatkan partisipasi anggota BPD yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perilaku ketua umum BPD dalam meningkatkan partisipasi anggota BPD di desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo menunjukkan adanya pengaruh yang nyata. Dimana dapat dilihat dalam tabel 20. bahwa jika dalam perilaku ketua umum BPD sering melaksanakan fungsi tugas dan hubungan sesuai dengan kondisi yang sering dilaksanakan maka semakin meningkatkan partisipasi anggota BPD dalam proses pengambilan keputusan.

5.2 Saran

Sesuai dengan apa yang penulis bahas dan simpulkan dapat diketahui bahwa peningkatan perilaku ketua umum BPD akan menyebabkan peningkatan partisipasi anggota BPD dalam pembangunan desa. Maka saran bagi ketua umum BPD hendaknya lebih meningkatkan perilakunya dalam rangka meningkatkan partisipasi anggotanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.1999. *Undang-Undang Dasar 1945. GBHN. Undang-Undang Kepegawaian nomor 43 tahun 1999.*
- Arikunto,S.1998. *Prosedur Penelitian.* Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Badan penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember.
- Bharata, I.N.1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan.* Jakarta: Ghalia
- Bryant, Coralie and Louise G. White. 1987. *Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang.* Jakarta: LP3ES
- Cohen dan Uphoff. 1977. *Rural Development partisipation Consep Measurement For Projet Design Implementation and Evaluation.*
- Cribbin, J.J. *Kepemimpinan Sumber Daya Manusia Mengefektifkan Organisasi.* Jakarta: PT. Pustaka Binaman Persada.
- David, K. 1979. *Human Relation In Busines Dinamics Of Organisation Behavioral.* Mc Grow Hill Book Company
- Gullick, dan Luther Gullick. 1937. *Paper On The Science Of Administration .*
- Hadi, S. 1989. *Metode Riset I dan II.* Yogyakarta.: penerbit Fakultas Psikologi
- Handyaningrat, S. 1989. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen.* Jakarta: Gunung Agung.
- Harold, K., 1989. *Management.* Jakarta: Erlangga
- Hersey, P dan Ken Blanchard. 1995. *Management Perilaku Organisasi: Pendencygunaan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Erlangga
- Koentjoroningrat, 1997. *Metodologi Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia
- Loedin, AA. 1976. *Pengantar Pengertian Dasar Penelitian.* Surabaya: Erlangga University Press
- Marbun, 1988. *Pembangunan Masyarakat Desa.* Jakarta: Aksara Baru
- Marzuki, 1982. *Metode Penelitian.* Jakarta: FE UI
- Millet,J.D.1954. *Management In The Public Services.* New York : Mc Graw Hill
- Mubyarto, dan S. Kartodiryo. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia.* Yogyakarta: Liberty

- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Galia Indonesia
- Ndraha, T. 1991. *Dimensi Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta : Bina Aksara
- Nitisemito, A. 1986. *Managemen Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Onong, U dan Effendi. 1981. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Bhinneka Cipta
- Prayitno, H da U. Burhan. 1987. *Pembangunan Ekonomi Pedasaan*. Yogyakarta: BPFE
- Raharjo. 1999. *Pengantar Sosiologi dan Pertanian*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Robbins, S.P. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Pren Hallindo
- Siagian, S. 1986. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Simanjuntak. 1981. *Pembangunan dan Perencanaan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, M dan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Sieget, S. 1986. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: FE UI
- Surarakhmad, W. 1990. *Pengantar Penelitian*. Bandung : Tarsito
- Syafei, IK.D Tanjung dan S. Modeong. 1997. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Terry, G. 1964. *Principles Of Management*. Homewood. Illinois: Richard Irwin Inc
- Thoha, M. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep Dsar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Raya Grafindo Persada.
- Tjokroamidjoyo, M. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Umar, H. 1998. *Riset Sumber Daya Manusia Dan Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Tjokrowinoto, M. 1996. *Pengantar Pembangunan, Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ulhaq, M. 1985. *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- Undang- Undang Otonomi Daerah*. 1999. Jakarta: Sinar grafika.

Westra, P. 1981. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Waluyo. 1989. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta

Yuwono, S. 1993. *Kepemimpinan Dalam Administrasi*. Yogyakarta: Liberty



Data Kuesioner

**Pengaruh Perilaku Ketua Umum BPD Untuk Meningkatkan Partisipasi
Anggotanya Dalam Pembangunan Desa**

**(Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan Dalam Rangka Perencanaan
Program Pembangunan di Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo)**

I. Identitas Peneliti

Nama : Nur Rahmad Cahyadi
NIM : 96-1198
Prog.studi : Administrasi Negara
Jurusan : Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Jl. Kalimantan III/48

Pengantar

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, kami bermaksud mengadakan penelitian, adapun penelitian ini merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan dalam rangka penyelesaian skripsi sebagai syarat meraih gelar sarjana S-1 pada Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Penelitian ini dilaksanakan sebatas pada sebuah karya ilmiah dan tidak dimaksudkan untuk merugikan kinerja saudara.

Kesediaan saudara untuk memberikan informasi yang valid akan sangat membantu kami. Informasi dan data tersebut sangat kami perlukan dalam penelitian karya ilmiah ini.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara menjawab data kuisisioner yang kami sediakan.

Hormat kami

(Nur Rahmad Cahyadi)

1. Identitas responden

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Jabatan :
Pendidikan terakhir :
Alamat :

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih sesuai dengan pilihan saudara

1. variabel perilaku ketua umum BPD (X)

1.1 Indikator perilaku mengarahkan :

Untuk mengukur indikator perilaku mengarahkan/ tugas ini dapat digunakan item-item sebagai berikut:

1. Apakah pemimpin menetapkan jenis atau pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh anggota? a. ya b. tidak
2. Apakah pemimpin memberitahukan kepada anggota tentang kapan dan dimana melaksanakan tugas ? a. ya b. tidak
3. Apakah pemimpin memberikan ketetapan waktu penyelesaian suatu tugas pekerjaan kepada anggota ? a. ya b. tidak
4. Apakah pemimpin memberitahukan kepada anggotanya tentang tata-cara melaksanakan tugas pekerjaan kepada anggota? a. ya b. tidak
5. Apakah pemimpin memberikan pengawasan atas tugas pekerjaan yang dilaksanakan anggota? a. ya b. tidak

1.2 Indikator perilaku mendukung/ hubungan:

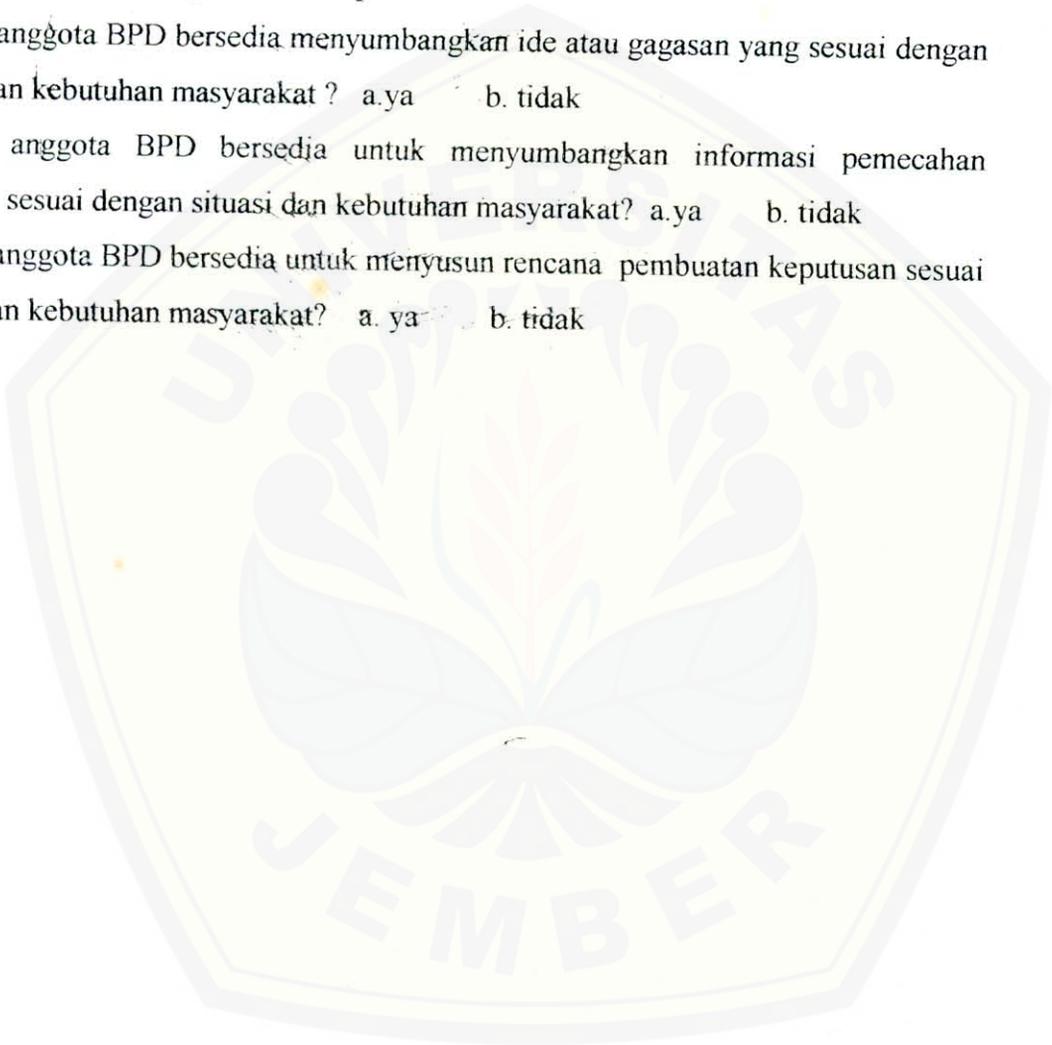
1. Apakah pemimpin mendengarkan anggotanya dengan jalan mendengarkan ide-ide mereka demi kebaikan bersama? a. ya b. tidak
2. Apakah pemimpin memberikan dukungan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa? a. ya b. tidak
3. Apakah pemimpin membina hubungan yang harmonis dengan jalan berinteraksi dengan anggotanya? a. ya b. tidak

4. Apakah pemimpin melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan?
a. ya b. tidak

2. variabel partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan desa (Y)

2.1 Indikator proses pengambilan keputusan :

1. Apakah anggota BPD bersedia menyumbangkan ide atau gagasan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat ? a.ya b. tidak
2. Apakah anggota BPD bersedia untuk menyumbangkan informasi pemecahan masalah sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat? a.ya b. tidak
3. Apakah anggota BPD bersedia untuk menyusun rencana pembuatan keputusan sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat? a. ya b. tidak





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No.37 Telepon (0331) 337818, Jember (68118)
E-mail : lemlit_unej@jember.Telkom.net.id

Nomor : 071 /J25.3.1/PL.5/2002
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian

22 Januari 2002

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Pemerintah Kabupaten Probolinggo
di -

PROBOLINGGO.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 0214/J25.1.2/PL.5/2002 tanggal 21 Januari 2002, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama/NIM : NUR RAHMAD CAHYADI / 96-1198
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Administrasi Negara
Alamat : Jl. Raya No. 5 Bulang Gending Probolinggo.
Judul Penelitian : Perilaku Ketua BPD Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggotanya Dalam Pembangunan Desa (Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan Dalam Program Pembangunan Di Desa Bulang Gending Probolinggo)
Lokasi : Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



Ketua,

[Signature]
Dr. T. Sutikto, MSc.
NIP. 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA
 Janan Achmad Yani Nomor 23 Telp. (0335) 421440
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH
 No. 072/02 /433.702/2002

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian Univ. Jember tanggal 22 Januari 2002 nomor: 071/J25.3.1/PL.5/2002. perihal Permohonan Ijin Penelitian
- Mengingat** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1972 ,
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Guls/187/1972 tanggal 17 Juli 1972 ;
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor : S.KDHL/257/BB/1973 tanggal 18 Mei 1973

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey Research oleh

Nama Penanggung Jawab : NUR RAHMAD CAHYADI
 Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak Ilmu Sosial Politik Univ. Jember
 Alamat : Jl. Raya Bulang No. 5 Gending - Probolinggo
 Tema / Acara Survey / Research : Perilaku Ketua BPD untuk meningkatkan partisipasi anggotanya dalam pembangunan Desa
 Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Desa Bulang, Kecamatan Gending
 Lamanya Survey / Research : 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat dikeluarkan
 Pengikut peserta Survey / Research : -

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai, menyinggung perasaan maupun menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagai tersebut diatas.

Probolinggo, 11 Februari 2002



KANTOR LINDMAS DAN KESBANG
 KABUPATEN PROBOLINGGO

KO PURNOMO
 Pembina Tk. I
 NIP. 010 265 306

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bapak Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
 2. Sdr. Dan Dim 0820 Probolinggo
 3. Sdr. Kapolres Probolinggo
 4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Probolinggo
 5. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian Univ. Jember
 6. Sdr. Camat Gending
 7. Sdr. Kepala Desa Bulang

SURAT PERNYATAAN / PENELITIAN

Nomor : 27 / X / 2002.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bulang.Kec.Gending.Kab -
Probolinggo.menerangkan dengan sebenarnya bahwa : -----

N a m a : MURHAMMAD CANYADI

U m u r : 24 tahun

Mahasiswa : Jurusan ADM (Administrasi Negara) Fak Ilmu
SOS dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Mengadakan penelitian di Desa kami pada tanggal 1 Maret 2002 Sampai de --
ngan 31 Maret 2002.

Hal tersebut dikerjakan dengan baik,sesuai judul Proposal pengrah prilaku-
ketua umum Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk meningkatkan partisipasi --
anggotanya dalam pembangunan desa.

Demikian surat pernyataan tersebut dibuat dengan sebenarnya .

Bulang, 3 Juni 2002

KAPALA DESA BULANG



MUHAMMAD ILYAS

Tingkat signifikansi untuk tes satu-sisi

	.10	.05	.025	.01	.005	.0005
Tingkat signifikansi untuk tes dua-sisi						
	.20	.10	.05	.02	.01	.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.405
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.326	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	1.303	1.684	2.031	2.423	2.704	3.551
50	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
60	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
70	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

Tabel B diringkaskan dari Tabel III dalam Fisher dan Yates: *Statistical tables for biological, agricultural, and medical research*, diterbitkan oleh Oliver and Boyd Ltd. Edinburgh, dengan izin dari para penulis dan penerbit.



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Kemungkinan di bawah H_0 bahwa $\chi^2 \geq$ chi-kuadrat

d/	.09	.08	.07	.06	.05	.04	.03	.02	.01	.001
1	.00010	.0039	.016	.04	.10	.15	.21	.27	.34	.41
2	.02	.04	.10	.15	.21	.27	.34	.41	.49	.58
3	.12	.18	.25	.32	.39	.46	.54	.62	.71	.81
4	.30	.43	.57	.71	.85	1.00	1.15	1.31	1.48	1.67
5	.55	.75	1.01	1.34	1.71	2.10	2.50	2.91	3.34	3.79
6	.87	1.13	1.64	2.20	2.83	3.53	4.26	5.00	5.76	6.54
7	1.24	1.56	2.17	2.83	3.58	4.35	5.14	5.94	6.76	7.60
8	1.65	2.03	2.73	3.49	4.30	5.14	6.00	6.88	7.77	8.68
9	2.09	2.53	3.32	4.17	5.08	6.00	6.94	7.90	8.87	9.86
10	2.56	3.06	3.94	4.86	5.81	6.78	7.76	8.75	9.75	10.76
11	3.05	3.61	4.58	5.58	6.59	7.61	8.64	9.68	10.73	11.79
12	3.57	4.18	5.23	6.30	7.41	8.51	9.61	10.71	11.82	12.93
13	4.11	4.76	5.89	7.04	8.23	9.41	10.59	11.77	12.95	14.14
14	4.66	5.37	6.57	7.79	9.07	10.33	11.59	12.85	14.12	15.39
15	5.23	5.98	7.26	8.55	9.91	11.24	12.56	13.87	15.17	16.46
16	5.81	6.61	7.96	9.31	10.71	12.10	13.48	14.84	16.19	17.53
17	6.41	7.26	8.67	10.08	11.51	12.92	14.31	15.68	17.03	18.37
18	7.02	7.91	9.39	10.86	12.33	13.77	15.18	16.56	17.92	19.27
19	7.63	8.57	10.12	11.65	13.12	14.57	16.00	17.40	18.78	20.15
20	8.26	9.24	10.85	12.44	13.92	15.38	16.83	18.25	19.64	21.02
21	8.90	9.92	11.59	13.24	14.74	16.23	17.68	19.10	20.49	21.86
22	9.54	10.60	12.34	14.04	15.57	17.06	18.53	19.97	21.36	22.72
23	10.20	11.29	13.09	14.85	16.39	17.89	19.38	20.82	22.24	23.59
24	10.86	11.99	13.85	15.68	17.24	18.76	20.23	21.68	23.05	24.39
25	11.52	12.70	14.61	16.47	18.04	19.58	21.05	22.52	23.90	25.26
26	12.20	13.41	15.38	17.29	18.82	20.35	21.83	23.32	24.72	26.11
27	12.88	14.12	16.15	18.11	19.60	21.12	22.61	24.03	25.44	26.95
28	13.56	14.82	16.93	18.94	20.39	21.90	23.39	24.81	26.22	27.76
29	14.25	15.57	17.71	19.77	21.16	22.68	24.16	25.58	26.99	28.57
30	14.95	16.31	18.49	20.60	21.95	23.46	24.95	26.36	27.77	29.38

Tabel C diringkaskan dari Tabel IV dalam Fisher dan Yates: *Statistical tables for biological, agricultural, and medical research*, diterbitkan oleh Oliver and Boyd Ltd. Edinburgh, dengan izin para penulis dan penerbit.